

## BAB II

### DUNIA ISLAM DAN PENGARUH PEMIKIRAN POLITIK BARAT

#### A. Sejarah Perkembangan dan Berdirinya Islam

Islam tumbuh di daerah gersang (tanah Arab) yang tidak memiliki sistem imperium dan kerajaan, ia tumbuh di kalangan masyarakat Badui yang tidak mempunyai aturan dan undang-undang seperti yang ada pada satu imperium atau kerajaan. Keadaan semacam ini justru merupakan keadaan yang paling tepat baginya, sebab dengan demikian ia dapat memiliki kekuasaan untuk menumbuhkan masyarakat yang mengiginkannya tanpa sifat kecongkakan, lalu meletakkan aturan dan sistem baginya, yang selanjutnya membimbing hati dan jiwa mereka seperti halnya dengan sikap dan amaliyah mereka, serta menyatukan urusan duniawi dan agama dalam cita-cita dan syari'atnya.<sup>1</sup>

Tanah Arab sebagai berdirinya Islam, dilihat dari budaya dan politik yang berkembang disekitarnya, tergolong peradaban yang masih tertinggal jauh, karena wilayah tersebut tidak memiliki sumber daya alam yang memikat, maka tidak ada tertarik memerintah di sana sebagai raja. Karena tidak ada kerajaan maka lembaga pengikat perseorangan dalam komunitas adalah kabilah. Dari berbagai kabilah ada inisiatif membentuk lembaga perwakilan yang disebut *mala'*, sebuah lembaga perwakilan para pemimpin kabilah. Tetapi di sini tidak ada satu orang yang diangkat sebagai top leadernya.

---

<sup>1</sup> Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, terj. Afif Mohammad, Cet. II (Bandung: Penerit Pustaka, 1994), hlm. 10.

Masing-masing kabilah memiliki kebebasan menentukan nasib kabilahnya masing-masing.<sup>2</sup>

Pada abad-abad sebelum datangnya Islam, beberapa peradaban besar muncul dekat Semenanjung Arabia. Di antara peradaban yang kuat adalah Kekaisaran Persia dan Romawi, yang mendominasi perkembangan budaya dan ekonomi kawasan tersebut. Masyarakat yang dibangun atas dasar perbedaan kelas, dimana kaisar dan keluarganya menikmati gaya hidup sangat mewah, yang di topang oleh rakyatnya, kaum pedagang, dan petani.<sup>3</sup> Pengaruh yang ada adalah, tanah Arab menjadi lahan perebutan diantara kedua kekuatan tersebut, khususnya tanah Arab sebelah Utara atau Selatan. Maka tidak heran menurut penulis, kondisi masyarakat saat itu sangat menderita (masa jahiliyah).

Menurut Sayyid Quthb, Islam hanya mengenal dua bentuk masyarakat: masyarakat Islam dan masyarakat jahiliyah. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang melaksanakan Islam dalam akidah dan ibadah, syari'at dan sistem (*nidzam*), serta dalam akhlak dan tingkah laku. Sedangkan masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang tidak menerapkan Islam, tidak dihukumi oleh akidah dan pandangan hidup Islam, oleh nilai-nilai dan timbangan Islam, serta tidak berakhlak dan bertingkah laku Islam.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Prof. Dr. Muh. Zuhri, *Potret Keteladanan Kiprah Politik Muhammad Rosululah*, Cet. I (Yogyakarta: LESFI, 2004), hal. 16.

<sup>3</sup> Christine Huda Dodge, *Kebenaran Islam Segala Hal tentang Islam A-Z*, terj. Ahmad Asnawi, Cet. I (Jogjakarta: Diglossia, 2006), hlm. 50-51.

<sup>4</sup> Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Cet. I (Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2005), hlm. 31.

Kejahiliah ini berpijak pada pelanggaran terhadap kekuasaan Allah SWT di muka bumi, khususnya adalah tentang Uluhiyah, yaitu *al-Hakimiyyah* otoritas kekuasaan. Mereka memberikan otoritas kekuasaan ini kepada manusia sehingga sebagian dari mereka menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan. Bukan dalam bentuk primitif yang sederhana, yang dikenal dalam kejahiliah zaman lampau, namun dalam bentuk klaim tentang hak menciptakan pandangan hidup, nilai-nilai, hukum, undang-undang, sistem dan institusi, yang steril dari manhaj Allah SWT bagi kehidupan ini dan dalam hal yang tidak diizinkan oleh Allah SWT.<sup>5</sup>

Peran dari Rasulullah sebagai pelopor pertama akan terbentuknya Islam membawa risalah pencerahan al-Qur'an atas Maha Kuasa Tuhan, secara mendunia tidak bisa diabaikan. Dan dari penerus Rosulullah tidak bisa dinafikkan juga ikut andil dalam berdirinya dan perluasan dunia Islam. Karena kita semua tahu, Islam ibarat sulaman karpet yang sangat besar, yang masing-masing tipe dan variasi dari berbagai budaya terlibat dalam proses penyulaman sehingga membentuk pola seperti *arabesque*; pola yang terdiri dari elemen amat luas yang merefleksikan Kesatuan Sunatullah.<sup>6</sup>

#### 1. Peran Nabi Muhammad Sebagai Pertama dalam Berdirinya Islam

Mulanya Muhammad Rasulullah dikenal oleh masyarakatnya sebagai orang istimewa karena perangnya. Ia lahir dari di keluarga

---

<sup>5</sup> Sayyid Quthb, *Petunjuk Jalan*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Yodi Indrayadi. Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 14.

<sup>6</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Islam: Agama, Sejarah, dan Peradaban*, terj. Koes Adiwidjajanto. Cet. I (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), hal. 27.

terhormat yang kurang manpu, Bani Hasyim. Ayahnya meninggal sebelum kelahirannya. Ibunya meninggal ketika usianya menginjak 6 tahun. Kakeknya yang mengantikannya orang tuanya pun meninggal 2 tahun kemudian. Sejak itu ia yatim piyatu. Akhirnya ia di beri gelas "*Al-Amin*", sebuah gelar yang menggambarkan tiada tara kejujuran dan ketulusannya.<sup>7</sup>

Nabi Muhammad lahir pada tahun 571 M di Makah, menerima wahyu pertama pada 13 tahun sebelum Hijriah pada usia 40 tahun. Di periode Makah ini beliau mengemban Risalah (Kerasulan) ketika beliau berusia 40 tahun, hingga Hijrah ke Madinah pada tahun pertama Hijriah, ketika beliau berusia 53 tahun. Periode ini adalah pembinaan akidah Islamiyah.<sup>8</sup>

Selam 13 tahun penuh, Al-Qur'an di turunkan di Makah hanya untuk mengupas satu permasalahan. Permasalahan yang amat mendasar dan sangat penting dalam agama samawi termuda ini, yakni masalah akidah, dengan dua fokus pembahasan utamanya: penuhanan (*al-uluhiyyah*) dan penghambaan (*al-'ubuudiyah*).<sup>9</sup>

Orang-orang kaya Mekah merupakan gambaran yang penting untuk menunjukkan hegemoni suku Quraisy dalam bentuknya, yang kalau mungkin dapat dinamakan pada zaman kita kini, ke dalam bentuk politik, dimana ketika itu para hartawan tampil sebagai embrio negara

---

<sup>7</sup> Prof. Dr. Muh. Zuhri, *Potret Keteladanan Kiprah Politik*, hlm. 19-20.

<sup>8</sup> H.Endang Saifuddin A.,M.A. *Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran tentang Paradigma dan Sistem Islam*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 56-57.

<sup>9</sup> Sayyid Quthb, *Petunjuk Jalan*, hlm. 26.

(pemerintahan) atau organisasi politik yang mengatur masalah-masalah sirkulasi perekonomian dalam masyarakat berkelas (*class society*). Pada saat yang sama, hal itu juga menggambarkan munculnya kelas-kelas tersebut dalam masyarakat jahiliyah.<sup>10</sup>

Rasulullah diutus membawa agama ini saat tanah Arab dilanda penyakit sosila yang sangat kronis. Ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi antar individu masyarakat Arab, serta kesewenang-wenangan para penguasa dan kaum bojuis Arab. Hanya segelintir dari mereka yang memiliki harta berlimpah, bahkan kekayaan mereka ini kian hari kian berlipat ganda dengan praktek riba yang mereka terapkan. Sedangkan sebagian besar lainnya tidak memiliki apa-apa kecuali kesengsaraan dan rintihan lapar yang tak kunjung reda. Seruan Rasulullah adalah akidah, bukan revolusi sosial, atas keadilan sosial dan pemerataan kekayaan masyarakat Arab secara keseluruhan. Karena kalau seruannya adalah revolusi sosial, maka yang terjadi masyarakat Arab akan terpecah menjadi dua, masyarakat kaya yang bertindak zalim, dan masyarakat yang di zalimi sebagai mayoritas penduduk Arab. Karena keinginan yang di bangun adalah memiliki pemahaman akidah yang komprehensif, tentang rezeki atas Allah.

Bangsa Arab pada saat kondisi moral pada stadium yang sangat menyedihkan. Yakni pada masyarakat Badui, masyarakat nomaden Arab. Namun secara umum, gejala-gejala yang terjadi di perkotaan menunjukkan

---

<sup>10</sup> Khalil Abdul Karim, *Hegemoni Quraisy Agama, Budaya, Kekuasaan*, terj. M. Faisol Fatawi. Cct. I (Yogyakarta: Lkis, 2002), hal. 79-80.

betapa moral yang berkembang saat itu sangat memperhatikan. Salah satu bentuk kamaksiatan, dan masih banyak tentang kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi di masyarakat itu, tergambar dalam cerita pernikahan gaya jahiliyah yang dituturkan oleh Aisyah r.a.<sup>11</sup> Seruan Rasulullah adalah akidah, bukan perbaikan moral, membersihkan masyarakat, dan menyucikan jiwa mereka, karena dalam hal ini akan disambut dengan suka gembira bagi orang-orang yang mempunyai nurani bersih. Hingga mereka berani meneriakkan perubahan dan rasa kesatria mereka tumbuh dengan dahsyat. Keinginan yang terbangun adalah, moralitas tidak dapat ditegakkan kecuali di atas landasan akidah yang menetapkan standar dan nilai-nilai moral, yang memberikan legitimasi adanya “lembaga kontrol moral” untuk menetapkan standar, nilai-nilai, serta hukuman yang patut diterima bagi pelanggar moral maupun bagi yang mematuhi.

Bangsa Arab yang subur berada di bawah kekuasaan bangsa asing. Tanah Syam, sebelah utara Jazirah Arab, menjadi jajahan Kekaisaran Romawi, kendati yang memerintah di sana adalah orang-orang Arab, tetapi mereka tunduk di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi. Sedangkan di sebelah selatannya, yakni negeri Yaman, berada di bawah kekuasaan orang-

<sup>11</sup> Syair dari Zuhair bin Abi Salma; “Barang siapa yang tidak menjaga kolam airnya dengan pedang, ia akan binasa. Barang siapa yang tidak menzalimi manusia, ia akan di zalimi”. Pepetah zaman jahiliyah; “Bantulah sudara mu, baik saat di berbuat zalim maupun saat ia di zalimi”. Tharfah Ibnul-Abd mengatakan; “Hanya tiga hal dari kehidupan seorang pemuda, demi kakak ku, aku tidak takut siapa pun yang datang menantang ku, salah satunya adalah perlombaan minum yang kalau tidak ditinggikan dengan air keluarlah sarinya, selama minuman keras menjadi kenikmatanku. Apapun akan aku korbankan, bahkan semua hartaku walau aku meski terkucil dari keluarga ku, menyendiri seeperti onta yang diperbudak”, dalam buku Sayyid Quthb, *Petunjuk Jalan*, hlm. 32. Lihat juga, bentuk pernikahan zaman jahiliyah dalam, *Ma’alim Fith-Thariiq (Petunjuk Jalan)*, hlm. 33.

orang Persia. Dan seruan Rosulullah adalah akidah, bukan revolusi melawan tirani dua imperium besar. Karena akan mengantarkan masyarakat Arab, berikut di dalamnya Rasulallah dan orang-orang mukmin, pada kekuasaan *thagut* baru. Perlu di garis bawah, bahwa setiap kekuasaan manusia, apa pun bentuknya, adalah *thagut*.<sup>12</sup>

Menurut Thaha Husein, sekiranya beliau hanya mengajarkan *tauhid* saja, tanpa menyerang sistem sosial dan ekonomi, tidak memperdulikan struktur miskin dan kaya, yang kuat dari yang lemah, budak dan majikan, serta tidak menganjurkan orang kaya mendermakan sebagian kekayaannya kepada fakir miskin, niscaya orang Makah tidak memusuhinya karena mereka sebenarnya bukan orang yang fanatik terhadap agama mereka, dan tidak sungguh-sungguh dalam menyembah berhala.<sup>13</sup>

Di sini kekuatan politik borjuis Makkah perlu digalang untuk menghambat laju dakwah Muhammad Rosulullah. Kemudian muncul kekuatan politik, pihak mayoritas memboikot Muhammad Rasulallah dalam kontak sosial. Maka tidak mengherankan kalau kemudian ia dan para pengikutnya dipersempit ruang geraknya agar dakwahnya dihentikan. Perlakuan orang kafir sampai pada tingkat mengancam jiwa beliau dan

---

<sup>12</sup> Sayyid Quthb, *Petunjuk Jalan*, hlm. 28-34.

<sup>13</sup> Prof. Dr. Muh. Zuhri, *Potret Keteladanan Kiprah Politik*, hlm. 23-24.

para pengikutnya. Dan karena tidak terlindungi oleh hukum adat kesukuan lagi. Hijrah adalah solusi terbaik.<sup>14</sup>

Ketika Allah memerintahkan Rasulullah saw. untuk hijrah dari Makah ke Madinah, kala itu di Madinah<sup>15</sup> terdapat orang-orang yang siap sedia untuk membuat agama Islam jaya. Dan dengan hijrah ke Madinah, maka Rasulullah SAW mampu membentuk masyarakat muslim yang menegakkan syari'at Allah, membuat Islam jaya, dan berjuang meninggikan kalimat Allah.<sup>16</sup>

Kedatangan Rasulullah di Madinah bukan prakarsa Nabi semata, tetapi, kata orang Jawa, *tumbu entuk tutup*<sup>17</sup>. Masyarakat Yatsrib terdiri atas banyak komunitas kesukuan dan agama. Ada komunitas Yahudi, kaomunitas Aus, komunitas Khazraj (dua komunitas yang disebut terakhir ini berasal dari Arab Selatan), komunitas Badui. Itu artinya masyarakat Yatsrib lebih heterogen dari masyarakat Makkah.<sup>18</sup>

Sebelum kedatangan Rasulullah di Madinah, disana sering terjadi peperangan di antara berbagai kelompok tanpa henti. Boleh jadi disebabkan oleh jumlah penduduk yang semakin bertambah, sementara

<sup>14</sup> Prof. Dr. Muh. Zuhri, *Potret Keteladanan Kiprah Politik*, hlm. 25.

<sup>15</sup> Semula kota itu disebut Yatsrib. Setelah Nabi bermukim disana, nama kota itu disebut Madinah. Dalam bahasa Arab, tamaddun artinya berperadaban. Agaknya, pemberian nama "Madinah" mempunyai maksud bahwa kota itu merupakan pelopor peradaban, dari Jahili menjadi "terpelajar". Dalam buku, Prof. Dr. Muh. Zuhri, *Potret Keteladanan Kiprah*, hlm. 29.

<sup>16</sup> K. Salim Bahnasawi, *Butir-butir Pemikiran Sayyid Quthb Menuju Pembaharuan Gerakan Islam*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, Taqiyuddin Muhammad, Ahmad Ikhwan. Cet. II (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 125.

<sup>17</sup> Untuk menyebut saling membutuhkan antara masyarakat Yatsrib dengan pihak Rasulullah.

<sup>18</sup> Prof. Dr. Muh. Zuhri, *Potret Keteladanan Kiprah Politik*, hlm. 29.

sumber penghidupan terbatas. Kehidupan ekonomi di sana ketika itu didominasi oleh komunitas Yahudi. Bahkan, sebagian tanah subur dikuasai oleh mereka. Sesama pendatang, orang Yahudi mempunyai kelebihan pengetahuan di bidang peratnian. Kalau tadinya mereka datang sebagai tuna wisma, setelah beberapa generasi akhirnya menjadi tuan tanah. Kepongahan orang Yahudi karena “kelebihan” mereka, menimbulkan kebencian orang Arab Yatsrib terhadap Yahudi menjadi semakin kuat. Mereka mengharapkan seseorang yang dapat menyelamatkan mereka dari penindasan ekonomi dan politik yang mematikan, yang telah mengakar di kota itu dalam waktu panjang serta telah melumpuhkan mereka.

Klimaksnya terjadi pada peperangan Bu’ath pada tahun 618 M. (Rasulullah melaksanakan Hijrah tahun 622 M). Hampir semu suku-suku Arab dan Yahudi di Madinah terlibat di dalamnya. Kelompok yang terlibat dalam peperangan tersebut akhirnya kehabisan tenaga dan sumberdaya meteri. Dan permusuhan pun di hentikan. Namun tidak ada kesepakatan damai. Kota Yatsrib berada dalam ketegangan. Keadaan damai sangat diperlukan agar kehidupan dengan mengarap tanah dapat berjalan seperti semula.<sup>19</sup>

Pada akhirnya kedatangan Rasulullah dapat merangkul dari masyarakat Madinah yang heterogen tersebut. Bangunan masyarakat Islam itu berasil dibentuk, dan kaidah-kaidah yang sebelumnya bersifat general selesai dijabarkan secara mendetail. Syari’at Islam disempurnakan dengan

---

<sup>19</sup> Prof. Dr. Muh. Zuhri, *Potret Keteladanan Kiprah Politik*, hlm. 30.

mendeklarasikan prinsip-prinsip baru dan dimulailah pengaplikasian serta pelaksanaan prinsip-prinsip itu seluruhnya. Sehingga tampillah Islam dalam bentuk sosialnya secara intergral dan aktif, yang semuanya menuju tujuan yang satu.<sup>20</sup>

Dalam teori maupun praktek, Nabi menempati posisi yang unik sebagai pemimpin dan sumber spiritual undang-undang Ketuhanan, namun sekaligus juga pemimpin pemerintahan Islam yang pertama. Kerangka kerja konstitusional pemerintahan ini terungkap dalam sebuah dokumen terkenal yang disebut dengan “Konstitusi Madinah” atau “Piagam Madinah”.<sup>21</sup> Dalam pencapaian damai dengan perjanjian Piagam Madinah. Dan disebut juga sebagai konstitusi perjanjian damai (kontrak sosila) di dalam masyarakat Madinah. Ini merupakan bentuk awal dari sistem politik negara di Islam, posisi Rasulullah sebagai Nabi dan pemimpin dari masyarakat Madinah.

## 2. Peran Khulafaur-Rasyidin dalam Perkembangan Islam

Semasa kehidupan Nabi saw. tidak pernah menyampaikan wasiat tentang siapa yang berhak menggantikan beliau sebagai pemimpin negara Islam. Inilah yang menjadi pemicu lahirnya perdebatan sengit dan berkepanjangan mengenai syarat-syarat Imam atau pemimpin ummat Islam. Abu Bakar r.a, sahabat Nabi paling akrab dan pendukung dakwah

---

<sup>20</sup> Dr. M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 3.

<sup>21</sup> Dr.Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, terj. Masrohin. Cet. III (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 1.

beliau yang paling awal meski bukan keluarga Nabi (tak berasal dari keluarga Nabi), tampil sebagai calon terkuat setelah sebelumnya muncul protes dari para penentangannya yang melibatkan para pemimpin terkuat Madinah. Untuk menagkal manuver-manuver warga Madinah dalam berbagai kekuatan atau kekuasaan, Abu Bakar menghendaki agar prioritas kepemimpinan setelah Nabi saw. dipegang oleh suku Quraisy. Tatkala tokoh-tokoh utama Quraisy memberikan dukungannya kepada Abu Bakar, penduduk Madinah pun mengikuti jejak mereka dengan suka cita. Masa 30 tahun berikutnya dikenal dengan era “Khulafaur-Rasyidin<sup>22</sup>” (*The Right Guided Successors*).<sup>23</sup>

Khalifah Abu Bakar r.a. (memerintah sejak 11 H./632 M. sampai 13 H./634 M.). Dia adalah yang pertama dari empat Khilafah yang diterima oleh kalangan Muslim Sunni sebagai khilafah yang telah mendapatkan petunjuk yang lurus (*al-Khulafa' ar-Rasyidin*) dan dipertimbangkan sebagai orang-orang yang menjaga kesucian dan saleh, yang kebijakan politisnya dibentuk oleh pertimbangan-pertimbangan relegius yang matang bahkan pada khusus mereka diandaikan mungkin telah melakukan kesalahan-kesalahan dalam keputusan politik. Abu Bakar, meskipun hanya memerintah dua tahun, telah menghadapi nyaris secara

<sup>22</sup> Khalifah adalah gelar yang diberikan untuk pemimpin umat islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW (570–632). Kata “Khalifah” (خليفة Khalifah) sendiri dapat diterjemahkan sebagai “pengganti” atau “perwakilan”. Pada awal keberadaannya, para pemimpin islam ini menyebut diri mereka sebagai “Khalifat Allah”, yang berarti perwakilan Allah (Tuhan). Akan tetapi pada perkembangannya sebutan ini diganti menjadi “Khalifat rasul Allah” (yang berarti “pengganti Nabi Allah”) yang kemudian menjadi standar untuk menggantikan “Khalifat Allah”. Meskipun begitu, beberapa akademis memilih untuk menyebut “Khalifah” sebagai pemimpin umat islam tersebut.

<sup>23</sup> Dr. Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis*, hlm. 2.

langsung dengan kekuatan-kekuatan tribalisme Arab yang telah menyimpang, yang mengancam untuk melepaskan diri dari kesatuan politis Arabia yang telah diciptakan oleh Nabi. Sumbangan terbesar Abu Bakar ialah menundukkan gejolak kesukuan dan mempertahankan kesatuan entitas politik yang baru didirikan, dengan ibu kotanya yang berada di Madinah.<sup>24</sup>

Khilafah Umar bin al-Khaththab r.a., yang memerintah sejak tahun 13H./634 M. hingga 23 H./644 M. Seorang tokoh yang dihormati, dan di bawah pemerintahannya umat Islam menaklukkan berbagai wilayah yang kelak menjadi jantung kekuasaan mereka. Selain itu Umar juga merupakan subyek atau sumber kebanyakan riwayat yang penting.<sup>25</sup> Pada masa pemerintahannya, kaum Muslimin mengambil alih Jerusalem, pada kesempatan itu Umar menunjukkan penghormatan yang tinggi terhadap rumah-rumah ibadah Yahudi dan Nasrani, dan Islam melintasi dan menyebar ke daerah-daerah Syiria, Persia, dan Afrika Barat.<sup>26</sup> Sebagaimana Umar telah mengatur secara sistematis administrasi negara dan jabatan-jabatan umum, meletakkan kaidah-kaidah distribusi kekayaan, mengontrol para gubernur, serta memerintah berdasarkan asas keadilan

---

<sup>24</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Islam: Agama, Sejarah, dan Peradaban*, hal. 134.

<sup>25</sup> Antony Black, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, terj. Abdullah Ali dan Mariana Ariestyawati. Cet. I. (Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 46-47.

<sup>26</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Islam: Agama, Sejarah, dan Peradaban*, hal. 134.

dan permusyawaratan, hanya dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan kaum Muslimin dan meninggikan kalimat Allah.<sup>27</sup>

Khalifah 'Utsman bin 'Affan r.a. pemerintahannya, berlangsung sejak 23 H./644 M. sampai 35 H./656 M. mengalami peristiwa melimpahnya kekayaan ke Madinah dan kota-kota Arab sisanya dari hasil penaklukan-penaklukan di berbagai propinsi, meskipun beberapa ketegangan meletup, mencakup beberapa gejolak kesukuan. Banyak kalangan yang mengeritik 'Utsman karena praktek nepotisme, secara eksklusif di dalam penunjukan keluarganya, Mu'awiyah, memegang jabatan gubener di Syiria.<sup>28</sup> Akan tetapi, pada akir-akhir pemerintahannya, terjadilah berbagai fitnah di beberapa daerah, setelah timbulnya fanatisme kekebilahan, membuat beberapa individu berani memberontak dan memasuki Madinah hendak memprotes beberapa kebijakan Khalifah.<sup>29</sup> Cara ini (pemerintahan 'Utsman yang favoritisme dan nepotisme) melahirkan rasa tidak puas dan keresahan pada sebagian anggota masyarakat kemudian berkembang menjadi pertikaian massal dan memuncak pada terbunuhnya 'Utsman.<sup>30</sup>

Khalifah Ali r.a., yang memerintah sejak 35 H./656 M. sampai 40 H./661 M., dihadapkan langsung pada sebagian besar waktunya dengan konflik, bahkan perang saudara, dari berbagai front. Para pengikut Syi'ah

---

<sup>27</sup> Dr.M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, hlm. 135.

<sup>28</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Islam: Agama, Sejarah, dan Peradaban*, hlm. 135.

<sup>29</sup> Dr. M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, hlm. 135.

<sup>30</sup> Dr.Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis*, hlm. 3.

berperang dengan sebageian suku Quraisy, pada salah satu sisi, dan para sahabat Nabi. Bersama-sama mayoritas pengikut di Irak, Ali memindahkan ibukota Daulah Islamiyah ke kota Kufah, dari sana dia mempersiapkan diri untuk menghadapi legium Syria, yang dipimpin oleh Mu'awiyah, yang menolak pembaiat Ali. Kedu rival bertempur yang menentukan di Shiffin tahun 36 H./657 M. tempat Ali memperoleh kemenangan, di sela-sela kemenangan Ali, Mu'awiyah menyiasati pasukannya datang ke medan perang dengan Kitab Suci al-Qur'an di ujung tombak. Untuk menghormati al-Qur'an, Ali menerima arbitrase yang berdampak kerugian di pihak Ali. Ali pulang ke Kufah tahun 40 H./661 M. salah seorang dari kelompok yang tidak setuju dengan proses *tahkim*, bahwa kedua kelompok yang bersetru keluar dari norma-norma Islam murni, berhasil menika Ali, sekaligus mengakiri era pemerintahan ar-Rasyidin. Dapat dinyatakan bahwa perbedaan khas antara Mazhab Sunni, Syi'i, dan kelompok ketiga Kharijiyyah (menentang kelompok baik Ahlussunnah maupun Syi'ah). Juga pemindahan ibukota negara Kufah oleh Ali telah mengalihkan pusat politik dari kebudayaan dunia Islam ke luar Arabia secara permanan, meskipun pusat keagamaan masih tetap dan berlanjut di kawasan Hijaz.<sup>31</sup>

### 3. Perkembangan Islam Sesudah Era Khulafa al-Rasyidin

Kaum Muslimin telah menjaga wasiat Rasulullah SAW tersebut sepanjang 13 abad. Selama interval waktu itu, kaum Muslimin tidak

---

<sup>31</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Islam: Agama, Sejarah, dan Peradaban*, hlm. 135-237.

pernah menyaksikan suatu kehidupan tanpa ada (dipimpin) seorang khalifah yang mengatur urusan-urusan mereka. Ketika seorang khalifah meninggal atau diganti, Ahlul Halli Wal'aqdi segera mencari, memilih, dan menentukan pengganti khalifah terdahulu. Hal ini terus berlangsung pada masa-masa Islam (saat itu). Setiap masa, kaum Muslimin senantiasa menyaksikan bai'at kepada khalifah atas dasar taat. Ini dimulai sejak masa Khulafaur Rasyidin hingga periode para Khalifah dari Dinasti 'Utsmaniyyah.

Fenomena ini terjadi pada tanggal 27 Rajab 1342 H. Dalam sejarah kaum muslimin hingga hari ini, pemerintah Islam di bawah institusi Khilafah Islamiah pernah dipimpin oleh 104 khalifah. Mereka (para khalifah) terdiri dari khalifah dari khulafaur rasyidin, 14 khalifah dari dinasti Umayyah, yang berlangsung lebih dari 89 tahun.

Dinasti Umayyah khalifah pertama adalah Mu'awiyah (tahun 40-64 H/661-680 M). Sedangkan khalifah terakhir adalah Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam (tahun 127-133 H/744-750 M).

Pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan periode awal Bani Abbasiyah, dua kekuatan neotribalisme Islam (atau komunalisme) dan birokrasi patrimonial bersaing untuk mengendalikan budaya politik. Patrimonialisme yang dimaksudkan disini adalah, sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada pemimpin untuk menganggap negara sebagai miliknya dan bisa diwariskan kepada keluarganya (turun-

temurun), sementara rakyat dipandang sebagai bawahan yang berada di bawah perlindungan dan dukungannya.<sup>32</sup>

Mu'awiyah, yang merupakan pemimpin yang amat lihai dan perhitungan, telah berhasil membunagun imperium yang luas dengan Damakus sebagai pusatnya, namun dibayar dengan harga penggantian sistem kekalifahan ar-Rasyidin yang berbalik menjadi kesultanan yang diwariskan. Bani Umayyah mampu menguasai wilayah dari Asia Tengah sampai Spanyol dan Prancis, membangun sistem komunikasi, administrasi, dan institusi-institusi pengadilan dan militer, yang kebanyakan diantaranya masih bertahan selama beberapa abad.<sup>33</sup>

Pada 18 khalifah dari dinasti 'Abbasiyyah, Khilafah pertama adalah Abul 'Abbas al-Safaah (tahun 133-137 H/750-754 M) dan khilafah yang terakhir Al-Qahir Billah (tahun 320-323 H/932-934 M).

Bani Abbasiyah meraih kekuasaan setelah memenangkan perang sipil ketiga (744-750) dan menjadi pahlawan keadilan Islam melawan Bani Umayyah yang korup. Pemimpin mereka, Abu al-Abbas al-Saffah (750-754), mengaku sebagai keturunan paman Muhammad; mereka meminta rakyat untuk memberikan kesetiaan kepada keluarga langsung Nabi. Dukungan pertama yang mereka peroleh adalah dari Khurasan (Iran Timur), yang disana mereka dikenal sebagai "pemilik daulah (yakni, dinasti yang telah di takdirkan Tuhan)". Periode awal Abbasiyah, tradisi kekuasaan terpusat "diimpor" dari Iran oleh Ibn al-Muqqaffa, yaitu ketika

---

<sup>32</sup> Antony Black, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi*, hlm. 50.

<sup>33</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Islam: Agama, Sejarah, dan Peradaban*, hlm. 137.

tradisi politik Islam belum terbentuk sempurna dan belum menemukan konsep politik yang jelas. Tradisi ini berhubungan erat dengan kehidupan kultural di istan dan para sekretaris raja. Monarki patrimonial memasuki tahap klasik di bawah bani Abbasiyah dan para penerusnya.

Pada masa Abbasiyah, *Dar al-Islam* meluas sampai ke kawasan pegunungan di Asia Tengah dan Barat Luat Afrika, padang rumput di dataran tinggi Iran Tengah, bagian timur Anatolia (yang masih nomad), dan ke kawasan pertanian yang kebanyakan menggunakan sitem irigasi, seperti Irak, Mesir, dan daerah Oxus. Penaklukan Islam membuka peluang bagi perdagangan jarak jauh yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, misalnya jalur dagang timur-barat dari Cina sampai Damaskus dan perdagangan melintasi Samudera Hindia dan Mediterania; di Mesir menjadi titik pusat, berkembang di seluruh daerah urban, dari Marw, Rayy, dan Bukhara, sampai Baghdad, Damaskus, Kairo (didirikan pada 970), dan Kordoba.<sup>34</sup> Diikuti dari Bani Buwaih, 8 orang khalifah, khilafah pertama Al-Radli Billah (tahun 323-329 H/934-940 M) dan khilafah terakhir Al-Qa'im Bi Amrillah (tahun 423-468 H/1031-1075 M).

Dinasti-dinasti semi-independen juga mulai muncul di sebelah utara dan barat wilayah Persia; Dinasti Buyaih/Buwaih, yang menaklukkan tidak hanya Persia, tetapi bahkan Irak pada abad ke-4 H./ke-10 M., dan berkuasa sebagai penganut Syi'ah didukung oleh sentimen kebangsaan Persia yang kuat.

---

<sup>34</sup> Antony Black, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi*, hlm. 53-55.

Pergerakan dan kemajuan suku-suku Turki memberikan kontribusi mengubah lanskap politik bahkan lanskap etnik pada teritori yang bermula dibawah kendali Dinasti Samaniyah, khususnya di Asia Tengah. Dinasti Ghaznawiyah, yang mempunyai asal-usul dari suku Turki, telah mengalahkan Dinasti Samaniyah dan mendirikan kerajaan perkasa yang baru disebelah timur Persia, meluaskan wilayahnya menuju Sindh dan Punjab. Kekuasaan mereka mempersiapkan perintisan bagi kemunculan sejumlah dinasti-dinasti dari asal-usul Turki yang akan memulai dominasi konstelasi politik tidak hanya di Asia Tengah dan Persia, tetapi bahkan dibeberapa bagian di tanah Arab, sebageian India, juga semenanjung Anatolia.<sup>35</sup> Dan dari Bani Saljuk II orang khalifah, khilafah pertama adalah Al Mu'tadi Biamrillah (tahun 468-487 H/1075-1094 M) dan khilafah terakhir Al Mu'tashim Billah ( tahun 640-656 H/1242-1258 M) .

Dinasti Turki yang paling penting adalah Bani Seljuk, berkuasa selama hampir 2 abad, dari 426 H./1035 M. sampai 656 H./1258 M. dinasti Seljuk telah menakhlukkan bagian barat Asia, termasuk kota Bagdad sendiri, yang jatuh ke tangan Tughril Beg pada 447 H./1055 M. mereka menyatukan kembali Asia Barat, mempertahankan keutuhan Khilafah 'Abbasiyah, namun hanya sebagai penguasa versi Mazhab Sunni secara simbolik, bersikap oposan terhadap penguasa Syi'ah, dan kenyataannya menindas penganut Syi'isme secara terang-terangan. Mereka juga merintis penaklukan dari semenanjung Anatolia yang

---

<sup>35</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Islam: Agama, Sejarah, dan Peradaban*, hlm. 141-142.

dikuasai oleh sesama bangsa Turki, yang kelak melahirkan famili Osmanli cikal-bakal penguasa Dinasti 'Utsmaniah.<sup>36</sup>

Setelah itu kaum muslimin hidup selama 3,5 tahun tanpa seorang khalifah pun. Ini terjadi karena serangan orang-orang Tartar ke negeri-negeri Islam dan pusat kekhalifahan di Baghdad. Namun demikian, kaum Muslimin di Mesir, pada masa dinasti Mamaluk tidak tinggal diam, dan berusaha mengembalikan kembali kekhilafahan.

Pusat pemerintahan dipindahkan lagi ke Mesir. Dari sini pusat pemerintahan dipindahkan ke kairo, yang dilanjutkan oleh 18 orang khalifah dari tahun 661 H./1262 M. sampai pada tahun 918 H./1517 M. Mereka mengklaim gelar khilafah atas nama imam mereka, dan pada akhirnya dapat memperluas kekuasaannya, sampai meliputi kawasan Jerusalem, Makkah, Madinah, dan Damaskus.<sup>37</sup>

Setelah itu khalifah berpindah kepada Bani 'Utsman. Dari Bani ini terdapat 30 orang khalifah. Umat masih mengetahui nama-nama para khulafaur rasyidin dibandingkan dengan yang lain. Walaupun mereka juga tidak lupa dengan Khalifah 'Umar bin 'Abd al-'Aziz, Harun al-rasyid, Sultan 'Abdul Majid, serta khalifah-khalifah yang masyur dikenal dalam sejarah. Bani Umayyah (40 H./661 M. sampai 132 H./175 M.)

Kesultanan Utsmaniyah (1299–1923), atau dikenal juga dengan sebutan Kekaisaran Turki. Kesultanan ini menjadi pusat interaksi antar Barat dan Timur selama enam abad. Pada puncak kekuasaannya,

---

<sup>36</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Islam: Agama, Sejarah, dan Peradaban*, hlm. 142.

<sup>37</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Islam: Agama, Sejarah, dan Peradaban*, hlm. 143.

Kesultanan Usmaniyah terbagi menjadi 29 propinsi. Dengan Konstantinopel (sekarang Istanbul) sebagai ibukotanya, kesultanan ini dianggap sebagai penerus dari kerajaan-kerajaan sebelumnya, seperti Kekaisaran Romawi dan Bizantium. Pada abad ke-16 dan ke-17, Kesultanan Usmaniyah menjadi salah satu kekuatan utama dunia dengan angkatan lautnya yang kuat. Kekuatan Kesultanan Usmaniyah terkikis secara perlahan-lahan pada abad ke-19, sampai akhirnya benar-benar runtuh pada abad 20. Setelah Perang Dunia I berakhir, pemerintahan Usmaniyah yang menerima kekalahan dalam perang tersebut, mengalami kemunduran di bidang ekonomi.

Sekali lagi terjadi dalam sejarah kaum Muslimin, hilangnya kekhalifahan. Sayangnya, kaum muslimin saat ini tidak terpengaruh, bahkan tidak peduli dengan runtuhnya kekhilafahan. Padahal menjaga kekhilafahan tergolong kewajiban yang sangat penting. Dengan lenyapnya institusi kekhalifahan, mengakibatkan goncangnya dunia Islam, dan memicu instabilitas di seluruh negeri Islam. Namun sangat disayangkan, tidak ada (pengaruh) apapun dalam diri umat, kecuali sebagian kecil saja. Jika kaum Muslimin pada saat terjadinya serangan pasukan Tartar ke negeri mereka, mereka sempat hidup selama 3,5 tahun tanpa ada khalifah, maka umat Islam saat ini, telah hidup selama lebih dari 75 tahun tanpa keberadaan seorang khalifah.

Seandainya negara-negara Barat tidak menjajah dunia Islam, dan seandainya tidak ada penguasa-penguasa Muslim bayaran, seandainya

tidak ada pengaruh tsaqofah, peradaban, dan berbagai persepsi kehidupan yang dipaksakan oleh Barat terhadap kaum Muslimin, sungguh kembalinya kekhilafahan itu akan jauh lebih mudah. Akan tetapi kehendak Allah berlaku bagi ciptaanNya dan menetapkan umat ini hidup pada masa yang cukup lama.<sup>38</sup>

## B. Dunia Islam

Maksud dari dunia Islam adalah bagian dari dunia antara Maroko hingga Merauke, negeri-negeri tempat umat Islam merupakan golongan mayoritas. Tempat-tempat yang termasuk dunia Islam antara lain adalah Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Nigeria, Sudan, Mesir, Eriteria, Suriah, Yordania, Irak, Iran, Lebanon, Saudi Arabia, Afganistan, Pakistan, Patani (Thailand Selatan), Malaysia, Filipina Selatan, dan Indonesia.<sup>39</sup>

Salah satu konsep kunci dalam Islam adalah konsep tentang *ummah*<sup>40</sup>, atau totalitas keanggotaan masyarakat yang muslim, dan yang membangun Dunia Islam. Islam memandang sejarahnya sendiri dengan bahasa keagamaan, dan menghubungkan-hubungkan kelompok masyarakat lain pada dasarnya bukan

<sup>38</sup> <http://www.kaskus.us/showthread.php?t=3214016/2011/01/19/>.

<sup>39</sup> H.Endang Saifuddin A.,M.A. *Wawasan Islam*, hlm. 272.

<sup>40</sup> *Ummah* adalah tidak, dalam berbagai hal, dibentuk atas dasar etnik, rasial, atau grup kultural yang tunggal. Islam adalah, sejak awal, agama yang ditujukan untuk seluruh umat manusia, dan amat tegas menentang segala bentuk rasisme dan tribalisme, seperti ditegaskan oleh ayat berikut, “Wahai umat manusia! Perhatikanlah! Kami telah menciptakan kalian dalam bentuk laki-laki dan perempuan, dan telah Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal antara satu sama lain! Ketahuilah! Seorang yang paling mulia di antara kalian, di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian.” (QS. 49:13). Dalam buku, Seyyed Hossein Nasr, *Islam: Agama, Sejarah, dan Peradaban*, hlm. 18.

melalui afiliasi kebahasaan ataupun etnis, tetapi lebih melalui segi identitas religius mereka.<sup>41</sup>

Sejarah munculnya peradaban Islam tidak bisa dipungkiri adalah kekuatan baru yang muncul ditempat yang berbeda, yang seiring berjalannya peradaban Barat. Peradaban Barat muncul di Yunani, belahan dunia bagian Barat (Eropa), sedangkan peradaban Islam muncul di belahan dunia Timur (Timur Tengah).

Peradaban Islam, pada mulanya adalah al-Qur'an, wahyu yang diturunkan Tuhan kepada Muhammad (w.632). setelah masa konflik pertama dan peristiwa hijrah ke Madinah (622, tahun pertama Hijrah), wahyu yang diturunkan telah menggabungkan suku-suku Arab ke dalam satu ikatan. Antara 634 dan 656, tentara Arab menghancurkan dan memecah belah kedua kekuatan adidaya itu, kerajaan Persia dan kerajaan Romawi, red. Jantung kawasan Eurasia-Palestina, Suriah, Irak, Mesir, Persia, dan Oxus-jatuh ke tangan mereka.<sup>42</sup>

Di saat yang beriringan, kondisi peradaban Barat berada pada periode abad pertengahan atau Kekristenan<sup>43</sup> yang berubah dari periode Yunani kuno.

---

<sup>41</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Islam: Agama, Sejarah, dan Peradaban*, hlm. 17.

<sup>42</sup> Antony Black, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi*, hlm. 35.

<sup>43</sup> Lewat invansi gencar, kekaisaran Roma pada akhirnya mendominasi Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Lewat penciptaan institusi-institusi uniknya, pemikiran politik yang dirangkul oleh para pemimpin Roma banyak diturunkan dari sumber-sumber Yunani yang menjadi sandarannya. Filosofis Plato menjadi pengaruh utama bagi siapapun yang mencoba memahami bentuk-bentuk pemerintahan, sifat dasar keadilan, atau peran pemimpin politik. Meski demikian, pada abad ke-1M, budaya dunia Klasik segera mendapatkan tantangan dari satu kekuatan lain-Kekristenan. Ketika kerajaan Romawi menjadi semakin despotik dan secara perlahan menemui ajalnya, sebuah kekuatan baru yang dinamis dan revolusioner lahir dari Timur. Dikenal sebagai Agama Kristen, gerakan baru ini berasal dari penduduk yang tersisihkan di wilayah kerajaan yang

Periode pertengahan di Eropa berlangsung dari abad ke-5 hingga abad ke-15. Bangsa-bangsa Eropa menyebutnya Abad Kegelapan (*dark ages*), namun itu sebenarnya adalah saat terjadinya satu inovasi substansial. Selama periode ini, para pemikir menemukan cara mereka dari sudut pemahaman klasik ke pemahaman Kristen mengenai dunia.<sup>44</sup> Abad dimana bangsa-bangsa di Eropa dipenuhi oleh perang antar agama, abad anti intelektualisme serta masih kuatnya akan tahayul dan irasionalisme.

Sejarah Islam berawal dari Arabia, tempat wahyu pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad, namun kemudian meluas dengan cepat di kalangan bangsa-bangsa di dunia. Selama kurang dari satu abad usai pembentukan masyarakat Islam pertama di Madinah oleh Rosulullah, pasukan-pasukan Arab telah menaklukkan dan merambah wilayah seluas dari Sungai Indus sampai Prancis, dengan membawa serta agama Islam, yang berbeda dengan konsepsi Barat yang selama ini populer, sama sekali tidak, dengan cara apa pun, dipaksakan kepada para penduduknya dengan acungan pedang.<sup>45</sup>

Ini yang membedakan penyebaran Islam dengan Barat, konsep Barat lebih cenderung menggunakan konsep kerajaan Imprium, seperti raja penakluk Alexander Agung atau Iskandar Zulkarnaen menjadi raja (336 SM) Macedonia

---

terpencil. Dari masa kelahirannya yang bersahaja, ia secara bertahap menyebarkan pengaruh sehingga mencakup semua dunia Romawi. Dalam buku, Joseph Losco, Leonard Williams, *Political Theory, Kajian Klasik dan Kontemporer*, hlm. 242.

<sup>44</sup> Joseph Losco, Leonard Williams, *Political Theory, Kajian Klasik dan Kontemporer*, terj. Haris Munandar. Volume I, Edisi II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 243.

<sup>45</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Islam: Agama, Sejarah, dan Peradaban*, hlm. 19.

dan mengerakkan pasukannya pergi ke arah timur untuk menaklukan Persia serta negeri lainnya.<sup>46</sup>

Atau kerajaan Imprium Romawi di era pertama Romulus (753 SM) sampai pada Yulius Caesar dan Augustus Caesar (abad ke-3).<sup>47</sup>

Pada masa-masa belakangan, Islam telah menyebar dengan cara damai melalui guru-guru Sufi atau jalur Sufisme<sup>48</sup> di kalangan penduduk Turki di Asia Tengah, dan pada akhirnya ke bagian barat melalui daerah utara Persia, sampai semenanjung Anatolia. Sebagian besar wilayah sub-benua India sejak abad ke-5 H/ke-11 M melaju dan menembus Jawa, Sumatra, dan Semenanjung Malaya dari abad ke-8 H/ke-14M. sejak sekitar abad ke-12H/ke-18M, Islam juga telah menyebar, jauh ke arah selatan Gurun Sahara di benua Afrika, bergerak, baik jauh ke selatan maupun ke pedalaman. Selama pendudukan Dinasti 'Utsmaniah di semenanjung Balkan, komunitas Islam telah dibentuk,

<sup>46</sup> Dr. Firdaus Syam, M.A., *Pemikiran Politik Barat Sejarah, Filsafat, Idiologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3*, Cet. I (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 29. Lihat juga, dalam buku Henri J. Schmandt, *Filsafat Politik Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, terj. Ahmad Baidlowi, Imam Baheheqi. Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 84.

<sup>47</sup> Henri J. Schmandt, *Filsafat Politik Kajian Historis*, hlm. 119-121.

<sup>48</sup> Sufisme; dalam bukunya Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola), kata sufi, artinya ilmu tasawuf, ahli tasawuf. Dalam bukunya, Syekh Abdul Qodir al-Jailani, *Samudera Sufi*, terj. Abdul Majid Hj.Khatib. Cet. III (Yogyakarta: Diva Press, 2008), hal. 199-200. *Pertama*, sufi ialah, mereka megenakan pakaian kasar yang terbuat dari bulu domba. Karena itu, mereka disebut *Shuf* (bahasa Arab), *Shufi*, pandangan orang-orang yang melihat mereka secara lahir saja. *Kedua*, orang yang memandang cara hidup orang-orang Sufi sebagai hidup yang bersahaja, sederhana atau ala kadarnya, tidak meperdulikan hal-hal duniawi, hidup yang tenang dan damai. Ketenagan dan kedamaian itu *Shafa* (bahasa Arab), maka mereka dinamakan Sufi. *Ketiga*, ada pula segolongan orang yang melihat lebih jauh kedalam hati orang-orang Sufi yang bersih dan bebas dari segala pikiran selain Allah. Hati mereka yang suci di sebut *Shafi* (bahasa Arab) dan karena itu mereka disebut Sufi. *Keempat*, segolongan manusia mengenal mereka sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah Swt. dan berdiri di barisan etrdapan di hadapan Allah pada Hari Pengadilan kelak. Barisan dalam bahasa Arab *Shaff*, karena itu mereka disebut Sufi.

terutama di Albania, Macedonia, Bosnia, Kosovo; beberapa dari komunitas ini telah berusia lebih dari 500 tahun.<sup>49</sup>

Umat Islam, dengan demikian, terdiri dari banyak elemen-elemen etnis, linguistik, dan budaya: Semit, Indo-Iran, Turki, Afrika kulit hitam, Melayu, Cina, dan kelompok-kelompok pengguna bahasa yang berjumlah banyak lainnya, terutama bahasa Arab, yang berasal dari bahasa Semitik, juga bahasa yang di gunakan di Iran, Indo-Eropa, Altaik, dan bahasa-bahasa Afrika. Islam ibarat sulaman karpet yang sangat besar, yang masing-masing tipe dan variasi dari berbagai budaya terlibat dalam proses penyulaman sehingga membentuk pola seperti *arabesque*; pola yang terdiri dari elemen amat luas yang merefleksikan Kesatuan Sunnatullah.<sup>50</sup>

### C. Sistem Politik Pemerintahan di Dunia Islam

Kita mengetahui bersama, bahwa sistem pemerintahan yang dibangun di tiap-tiap negara, yang mempunyai budaya, corak, dan kondisi material berbeda-beda. Khususnya sistem yang diterapkan di negara-negara yang termasuk dunia Islam.

Negara merupakan lembaga yang menguasai sebuah masyarakat. Tetapi, jelas pula bahwa negara terdiri dari berbagai lembaga didalamnya. Lembaga-lembaga ini saling berinteraksi dalam sebuah aturan dan prosedur yang membentuk sebuah sistem kekuasaan (membentuk satu tubuh red.).

---

<sup>49</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Islam: Agama, Sejarah, dan Peradaban*, hlm. 20.

<sup>50</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Islam: Agama, Sejarah, dan Peradaban*, hlm. 26-27.

Aturan dan prosedur ini didasarkan pada sebuah prinsip, sebuah norma yang dikaitkan untuk suatu tujuan tertentu.<sup>51</sup> Menurut penulis, lembaga-lembaga yang saling berintraksi dan membentuk satu tubuh, dalam tujuan sesuatu ini, di sebut dengan sistem.

Dan makna politik itu sendiri, dalam kajian Barat diambil dari bahasa Yunani *politicos* atau bahasa latin *politica*, dimana mempunyai kata dasar *polis*. Filosof Yunani seperti halnya Plato telah menulis karya politiknya dalam buku *politeia*, sedangkan muridnya Aristoteles menulis karya politik dalam buku *politica*. Pokok dasar dari karya ini adalah kepada persoalan mengatur dan mengorganisasikan orang per-orang, sampai masyarakat per-masyarakat, bahkan sampai Negara per-negara<sup>52</sup>.

Dalam bahasa Eropa, politik seakar kata dengan *politeia*, *poli*, *polish*. Artinya, hal yang berkaitan dengan keteraturan dan ketertiban. Selanjutnya, kata itu digunakan untuk menyebut area yang suasananya idealis seperti itu, kota. Disebut Konstantinople karena ia sebuah kota (*poli*) yang didirikan oleh raja Konstantine. Maka istilah politik dan polisi, kalau kita kembali kepada arti harfiah, selalu berasosiasi dengan kota, ketertiban dan keteraturan. Jadi, polisi sekarang ini sebenarnya punya tugas utama menjaga keteraturan dan ketertiban dalam rangka mewujudkan kota yang ideal. Politik menurut bahasa (dalam bahasa Indonesia) berarti kebijaksanaan yang terkait dengan kekuasaan dan atau pemerintahan Negara. Tentu kaitannya dengan ide di atas adalah

---

<sup>51</sup> Arif Budiman, *Teori Negara Negara, Kekuasaan, dan Idiologi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 82.

<sup>52</sup> Surwandono, S.Sos., M.Si, *Pemikiran Politik Islam*, LPPI UMY, hlm. 3-4.

telah merdeka, Inggris tetap bertahan di kawasan Teluk Arab dan Semenanjung Selatan (Yaman). Namun hal itu tidak mencegah sekutu terkuat dan pesaing terbesarnya, Amerika Serikat, untuk mengintai dan mulai berusaha menguasainya.<sup>54</sup>

Negara-negara di kawasan Timur Tengah, misalnya yang berlatar belakang Arab, telah menggabungkan diri dalam Liga Arab (*League of Arab States*), yakni; Mesir, Irak, Lebanon, Arab Saudi, Siria, Yordania, dan Yaman. Dan masih banyak lagi negara-negara yang berada di daratan Timur Tengah yang mayoritas masyarakatnya Islam.

Pada umumnya negara-negara Arab menghadapi masalah utama yang cukup pelik, yaitu belum mantapnya pemerintahan nasional masing-masing negara-negara Arab, kendatipun terdapat perbedaan gradasi dalam ketidak stabilan masing-masing pemerintahan. Legitimasi politik pada umumnya masih rapuh, padahal stabilitas dan kelestarian satu pemerintahan sangat di tentukan oleh legitimasi politik. Akibatnya, proses politik di dunia Arab dan Timur-Tengah pada umumnya di tandai dengan langkanya legitimasi politik, sehingga pergantian pemerintahan sering melewati cara kekerasan dan kurangnya aturan-aturan permainan perlemitter dan konstitusional.<sup>55</sup>

Dalam usaha mencapai stabilitas politik dan legitimasi yang kuat, masing-masing negara Arab menggunakan kepemimpinan perorangan yang

---

<sup>54</sup> Dr.Safar Al-Hawali. *Belitan Amerika di Tanah Suci: Membongkar Strategi AS Menguasai Timur Tengah*, terj. Sarwedi M. Hasibuan, cet. II, (Solo: Jazeera, 2005), hlm. 21.

<sup>55</sup> Drs. Sidik Jatmika, Msi, *Politik Timur Tengah, Bahan Ajar Perkuliahan Politik dan Pemerintahan Timur Tengah*, UMY 2004, hal. 5.

ketertiban dan keteraturan yang diciptakan dengan kebijaksanaan dalam kekuasaan. Dengan kebijaksanaan maka politik terkait erat dengan misi dan ideologi. Hakekat politik adalah kegiatan (sistem negara atau sistem pemerintahan yang dibangun red.), bukan kekuasaan. Ini bukan berarti kekuasaan itu di luar politik<sup>53</sup>. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya para aktor politik lebih cenderung menempatkan politik sebagai media mencari kekuasaan.

Dunia Islam, seperti diterangkan di atas, terdiri dari berbagai negara-negara yang menyebar di berbagai belahan dunia, dimana negara-negara tersebut mempunyai mayoritas masyarakatnya adalah Muslim. Negara-negara ini antara lain;

1. Negara-negara yang Berada di Kawasan Timur Tengah atau Dunia Arab.

Timur Tengah mempunyai posisi geografis yang merupakan wilayah terletak pada pertemuan daratan Eropa, Asia, dan Afrika. Kirakira sudah sejak 4 abad yang lalu, kaum imperialisme Salib Barat (*Crusader*) berusaha menguasai kawasan teluk ini, seperti upaya yang dilakukan oleh bangsa Portugis. Pada abad lalu, persaingan antara Prancis dan Inggris sempat memanas, hingga akhirnya Inggris berhasil menjadi penguasa tunggal di kawasan tersebut, dan seluruh negara Barat menyerahkan kawasan tersebut kepada Inggris. Apollo, yang terkenal sebagai "matahari" Kerajaan Inggris mulai melancarkan misinya setelah Perang Dunia II berakhir. Meskipun kebanyakan negara bekas jajahannya

---

<sup>53</sup> Prof. Dr. M. Zuhri, *Potret Keteladanan Kiprah Politik*, hlm. 1.

sedikit banyak bersifat “otoriter” atau menggunakan ideologi sebagai alat pemaksa bagi persatuan rakyat. Dengan kata lain ideologi bersumber pada struktur politik yang sudah aman. Secara garis besar, kita bisa katakan bahwa negara Arab masih harus berjuang untuk mengatasi masalah identitas, bahwa konflik antara ikatan rakyat dengan komunitas politik nasional sering bertabrakan, dengan kesetiaan yang bersifat sub-nasional atau supra nasional. Otoritas, bahwa wibawa pemerintahan di negara-negara tersebut belum cukup, sehingga sering muncul kekerasan politik. Dan ekualitas, bahwa tercermin dalam semboyan *hurriya* (kemerdekaan), *dimuqratiyya* (demokrasi), dan *isytirakiyya* (sosialisme), lebih merupakan impian dan harapan daripada kenyataan.

Oleh karenanya, sistem politik yang dibangun di negara-negara Timur Tengah, adalah;

- a. Sistem monarki, yang digunakan oleh negara Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Maroko, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Yordania.
  - b. Sistem republic, yang digunakan oleh negara Iraq, Aljazair, Djibouti, Israel, Lebanon, Mauritania, Mesir, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, Turki, Yaman, dan Iran.
  - c. Sistem kedaulatan rakyat atau jumbuhriyah, yang digunakan oleh negara Libiya.<sup>56</sup>
2. Negara-negara yang Berada di Kawasan Asia

Asia mempunyai posisi geografis yang merupakan wilayah terletak pada pertemuan daratan Arab, Afrika, dan Australia. Pada umumnya permasalahan-permasalahan yang ada di Asia adalah kolonialisme Barat.

---

<sup>56</sup> Drs. Sidik Jatmika, Msi, *Politik Timur Tengah*, hlm. 6-9.

Sejarah hubungan internasional di Asia Tenggara sebelum kehadiran negara-negara kolonialisme Eropa di tandai dengan pergulatan perebutan kekuasaan antara negara yang ada di kawasan daratan maupun maritim Asia Tenggara.<sup>57</sup> Negara-negara yang mempunyai mayoritas Islam antara lain;

Indonesia, Hubungan Islam dan negara Indonesia, terutama pasca kemerdekaan, pada waktu-waktu tertentu dapat dikatakan kurang harmonis. Konflik dalam parlemen, seperti upaya menjadikan Islam sebagai dasar negara dalam konstitusi dan pemberontakan-pemberontakan daerah yang membawa bendera Islam, diakui banyak ikut menyumbang terhadap kesan bahwa Islam sedang berkonflik dengan negara. Pada satu sisi, Islam menghendaki agar negara dan masyarakat Indonesia diatur berdasarkan agama Islam. Pada sisi lain, negara menghendaki agar masyarakat Indonesia diatur berlandaskan pada kesepakatan bersama.<sup>58</sup> Tapi dalam kenyataannya, bahwa Indonesia mempunyai sejarah dari kolonialisme Barat (Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang) ikut memwarnai dalam perkembangannya negara, dalam sistem negara Indonesia menerapkan republik secara demokratis.

---

<sup>57</sup> Dr. Bambang Cipto, M.A., *Hubungan Internasional di Asia Tenggara Teropong terhadap Dinamika, Kondisi Riil dan Masa Depan*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 9.

<sup>58</sup> Taufiq Nugroho, *Pasang Surut Hubungan Islam dan Negara Pancasila*, Cet. I (Yogyakarta: PADMA, 2003), hlm. 23-24.

Malaysia yang merdeka dari jajahan Inggris tahun 1967<sup>59</sup> dan sistem negara, Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang dasar (konstitusi).<sup>60</sup>

Thailand, dikalangan negara-negara ASEAN, negara yang belum pernah dijajah ini termasuk negara terbesar ke tiga, pada era kolonialisme Asia Tenggara negara ini berfungsi sebagai negara penyangga antara kolonialisme Inggris di Burma dan Prancis di Vitnam.<sup>61</sup>

Brunai Darussalam, adalah negara terkaya di Asia Tenggara walaupun jumlah penduduknya sedikit. Namun untuk menjaga posisinya yang rentan, khususnya dari tekanan Malaysia, Brunai tetap bertahan sebagai negara protektorat (wilayah atau negara yang berada di bawah perlindungan negara lain, negara kuat) hingga awal tahun 1984.<sup>62</sup> Dan sistem pemerintahannya, Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang (raja, ratu, syah, atau kaisar) yang kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas, Brunei (Sultan Hassanali Bolkih Mu'izzadin Waddaulah).

Pakistan, seperti Islamisasi sebuah contoh lain akan kebangkitan Islam ritual yang dipicu oleh negara. Jendral sekaligus presiden Zia-ul-

---

<sup>59</sup> Dr. Bambang Cipto, M.A., *Hubungan Internasional di Asia*, hlm. 18.

<sup>60</sup> <http://www.slideshare.net/bunglon/sistem-pemerintahan-di-berbagai-negara/2011/01/>  
28/.

<sup>61</sup> Dr. Bambang Cipto, M.A., *Hubungan Internasional di Asia*, hlm. 19.

<sup>62</sup> Dr. Bambang Cipto, M.A., *Hubungan Internasional di Asia*, hlm. 20.

Haq, kaki tangan penjajah Barat yang setia, mengulingkan Bhutto dan kemudian memanfaatkan Islam untuk melakukan konsolidasi kedudukan politiknya.<sup>63</sup> Dan di India, Sistem yang diterapkan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan.<sup>64</sup>

Dan negara-negara yang lain, yang mempunyai masyarakat Muslim tetapi dalam jumlah minoritas. Masyarakat Islam yang tersebar di belahan dunia, baik di Barat, kawasan Asia secara keseluruhan, dan Australia. Masing-masing masyarakat Islam tersebut, mengikuti sistem, budaya, dan kondisi negara-negaranya. Tetapi pada dasarnya masyarakat Islam dunia di satukan dalam satu keyakinan, yaitu iman terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah.

#### **D. Politik Islam dan Para Pemikirnya**

Negara merupakan organisasi tertinggi dan terbesar di muka bumi, paling tidak untuk saat ini, dan politik tidak bisa dilepaskan dalam berdirinya negara. Karena sistem politik atau sistem pemerintahan adalah pelaku yang megurusi di dalam internal atau tubuh negara itu sendiri. Negara pada

---

<sup>63</sup> Asghar Ali Engincer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro. Cet. IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 147.

<sup>64</sup> <http://www.slideshare.net/bungl0n/sistem-pemerintahan-di-berbagai-negara/2011/01/28/>.

dasarnya juga sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diatur dalam suatu sistem kehidupan, khususnya sistem politik.

Politik Islam, adalah sistem politik yang dimaksud di sini tentu, suatu politik yang berbasis nilai-nilai Islam atau syari'at Islam. Politik di sini merupakan *siyasah syar'iyah*. Menurut Yusuf Al-Qardhawiy bahwa *siyasah syar'iyah* adalah politik yang dilandaskan kepada kaidah-kaidah syari'at, hukum, dan tuntunannya, (kepada Islam yakni al-Qur'an dan as-Sunnah red.).<sup>65</sup> Perkataan *siyasah* mengandung isi kenegaraan sebagai halnya perkataan politik. Di mulai zaman Nabi, sabda beliau yang mengandung sejarah (*historise waarde*). Dalam hal ini hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah:

“Kaum Bani Israel (Yahudi) *siyasah* kenegaraan mereka dipimpin oleh Nabi. Setiap meninggal seorang Nabi, dia digantikan oleh Nabi yang kemudian. Sesungguhnya aku tidaklah ada Nabi yang akan mengantikan di belakang-ku. Aku yang bakal ada (hanyalah) khalifah-khalifah (kepala negara) yang jumlah mereka adalah banyak.”

Tafsiran dari kata “*siyasah*” dalam hadis tersebut, yang dipimpin oleh Nabi, menurut ahli hadis Qisthilani (851-923 H); “Perkataan itu artinya urusan pemerintahan mereka dipimpin oleh para Nabi, sebagaimana halnya pemimpin negara menyelenggarakan rakyatnya.” Sistem kenegaraan dalam Islam tidak sama dengan istilah teokrasi seperti kaum gereja di abad pertengahan dengan memilih pemimpin mereka dari kalangan gereja kemudian berhak secara paksa “memutih-hitamkan” rakyat atas nama Tuhan. Sistem kenegaraan Islam

---

<sup>65</sup> Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya terhadap Dunia Ke-3*, cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 301.

juga bukan berbentuk sekulerisme; memisahkan agama dalam kehidupan bernegara, politik kenegaraan Islam, berdasarkan nilai-nilai Islam.<sup>66</sup>

Sistem politik Islam itu didasarkan atas tiga prinsip, yakni Tauhid (Kemaha Esaan Tuhan), Risalah (kerasulan Muhammad) dan Khalifah. *Tauhid*, berarti hanya Tuhan Yang Maha Esa sajalah pencipta, pemelihara, dan penguasa dari seluruh alam (universum dan segala yang terdapat di dalamnya baik organis maupun inorganis). Kedaulatan ini hanya terletak padanya. Dia sajalah yang bisa memberi perintah atau melarang. Pengabdian (ibadah) dan ketaatan hanya kepada-Nya, tiada pihak manapun yang berhak dalam taraf bentuk apa pun. *Risalah*, Rasulullah sesuai maksud dari kitabullah itu, telah menegakkan bagi kita salah satu pola dari sistem hidup dalam Islam dengan melaksanakan hukum Islam itu dan memebrikan dalam praktek dengan detail (secara rinci) yang diperlukan. Kombinasi kedua dinamakan *syari'ah*. Sistem yang dibangun Rasulullah dan kaum Muslim yang hidup bersama beliau di Madinah, jika dilihat dari segi praktis dan diukur dengan variabel-variabel politik di era modern, tidak disangsikan lagi bahwa, sistem itu adalah sistem politik *par excellence*. Dapat juga dikatakan bahwa sistem ini adalah sistem religius, jika dilihat dari tujuannya, motifnya, dan fundamental maknawi tempat sistem itu berpijak. *Khalifah*, menurut kamus bahasa Arab berarti perwakilan (*representation*). Menurut ajaran Islam adalah posisi khalifah atau wakil dari Tuhan. Khalifah perwujudan dari wakil rakyat di dalam sistem politik Islam. Di sini duduk para khalifah, lembaga tempat mereka berkumpul

---

<sup>66</sup> Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat: Sejarah*, .....hlm. 301-302.

dan membicarakan atau memecahkan setiap persoalan yang berkaitan dengan kemasyarakatan atau kenegaraan dan dilakukan di Majelis Syura dengan musyawarah (*syura bainahum*). Majelis syura itu mempunyai keputusan legislatif yang akan mengikat.<sup>67</sup>

Berbicara sistem politik Islam, seperti keterangan di atas, tidak lepas dari pada pendapat atau pemikiran-pemikiran para pemikir politik Islam itu sendiri. Para pemikir politik Islam yang bisa mewarnai akan perkembangan kasanah wacana dialektis dalam keilmuan politik sebagai penyeimbang akan perluasan keilmuan politik dari Barat. Dan bentuk konsep negara dalam Islam sendiri, bermacam pendapat telah muncul dalam rangka menganalisis teori tentang kedudukan negara dalam Islam. Nampaknya pengelompokan kepada tiga golongan seperti disimpulkan oleh H. Munawir Sjadzali mewarnai kalsifikasi visi para pakar Islam masa kontemporer mengenai konsepsi negara dalam Islam, yaitu:

#### 1. Aliran Pemikir Fundamentalis

Pendapat pertama ini menyatakan bahwa, Islam agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan di segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam kehidupan politik dan bertatanegara. Golongan ini menyatakan bahwa, dalam bernegara umat Islam tidak perlu meniru sistem ketatanegaraan Barat, tapi sebaliknya hendaklah kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam. Lebih kongkret lagi sistem ketatanegaraan yang dijadikan acuan adalah sistem tatanegara yang dilaksanakan oleh

---

<sup>67</sup> Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat: Sejarah*, .....hlm. 302-303.

nabi Muhammad dan empat Khulafa al-Rasyidin dimasa awal perkembangan Islam. Pemikir-pemikir yang termasuk pada golongan ini antara lain, sebagai berikut:

a. Al-Mawardi (386 H./975 M.- 450 H./1059 M.)

1. Biografi Singkat

Nama lengkapnya ialah Abu al-Hasan Ali al-Mawardi. Begitu peradaban Barat biasa menyebut pemikir dan pakar ilmu politik termasyhur di era Kekhalifahan Abbasiyah ini. Lahir di kota pusat peradaban Islam klasik, Basrah (Baghdad) pada 386 H/975 M, belajar ilmu hukum dari Abul Qasim Abdul Wahid as Saimari, seorang ahli hukum mazhab Syafi'i yang terkenal. Pindah ke Baghdad melanjutkan pelajaran hukum, tata bahasa, dan kesusastraan dari Abdullah al Bafi dan Syaikh Abdul Hamid al Isfraini. Dalam waktu singkat ia telah menguasai dengan baik ilmu-ilmu agama, seperti hadis dan fiqh, juga politik, filsafat, etika dan sastra. Di mata raja-raja Bani Buwaih, Al-Mawardi mendapatkan kedudukan yang cukup tinggi. Ia hidup pada masa pemerintahan dua khalifah: Al-Qadir Billah (381-422 H) dan Al-Qa'imu Billah (422-467 H). Wafat pada 1058 M, dalam usia 83 tahun.<sup>68</sup>

2. Kondisi Sosial Politik

Situasi politik di dunia Islam pada masa Mawardi, yakni sejak menjelang akir abad X sampai pertengahan abad XI M. Semula

---

<sup>68</sup> <http://poetraboemi.wordpress.com/2009/04/20/al-mawardi-biografi-dan-pemikiran-politiknya/>.

Baghdad merupakan pusat peradaban Islam dan poros negara Islam. Khalifah di Baghdad merupakan otak peradaban itu, dan sekaligus jantung negara dengan kekuasaan dan wibawa yang menjangkau semua penjuru dunia Islam. Tetapi kemudian lambat laun cahaya yang gemerlapan itu pindah dari Baghdad ke koya-kota lain. Kedudukan khilafah mulai melemah, dan dia harus membagi kekuasaannya dengan panglima-panglimanya yang berkebangsaan Turki atau Persia. Mulai tampak pula bahwa tidak mungkin lagi imperium Islam yang demikian luas wilayahnya harus tunduk kepada seorang kepala negara tunggal. Pada waktu itu khilafah di Baghdad hanya merupakan kepala negara yang resmi dengan kekuasaan formal saja, sedangkan yang mempunyai kekuasaan sebenarnya dan pelaksana pemerintahan adalah pejabat-pejabat tinggi dan panglima-panglima yang berkebangsaan Turki atau Persia serta penguasa-penguasa wilayah. Meskipun makin lama kekuasaan para pejabat tinggi dan panglima non-Arab itu makin meningkat, sampai waktu itu belum nampak adanya usaha dipihak mereka untuk menggantikan khilafah Arab dengan khilafah yang berkebangsaan Turki atau Persia.

Namun demikian, mulai terdegar tuntutan dari sementara golongan agar jabatan itu dapat diisi oleh orang-orang bukan Arab dan tidak dari suku Quraisy. Tuntutan itu sebagai mana, memunculkan reaksi dari golongan lain, khususnya dari golongan Arab yang ingin mempertahankan syarat keturunan Quraisy untuk mengisi jabatan

kepala negara.<sup>69</sup> Al-Mawardi yang dalam memberi syarat calon pemimpin negara harus berbangsa Arab dan bersuku Quraisy<sup>70</sup>, karena adanya nash tentang hal itu dan telah terwujudkan ijma ulama tentang masalah itu. Pendapat Dhirar, yang membolehkan kepemimpinan negara bagi semua orang adalah pendapat yang tidak dapat didegarkan karena Abu Bakar ash-Shiddiq r.a berdalil pada hari Saqifah di hadapan kalangan Anshar, saat ia menolah tindakan mereka yang membaia Sa'ad bin Ubadah r.a untuk memangku jabatan khalifah, dengan sabda Rasulullah saw., "*Para pemimpin adalah dari kalangan suku Quraisy*". Dan "*Angkatlah individu dari suku Quraisy dan jangan kalian langkahi (mendahului) mereka.*"<sup>71</sup>

### 3. Pemikiran Politik Islam

Mawardi berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi Mawardi memasukan unsur agama dalam teorinya. Menurut Mawardi adalah Allah menciptakan kita supaya kita tidak sanggup memenuhi kebutuhan kita orang-seorang, tanpa bantuan orang lain, agar kita selalu sadar bahwa Dia-lah pencipta kita dan pemberi rezeki, dan bahwa kita membutuhkan Dia serta memerlukan pertolongan-Nya. Bahkan Mawardi berpendapat, manusia adalah

<sup>69</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Edisi V. (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 58-59.

<sup>70</sup> Drs. Abdul Azis Thaba, M.A., *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (1966-1994)*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 110.

<sup>71</sup> Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 18.

mahluk yang paling memerlukan bantuan pihak lain dibandingkan dengan mahluk-mahluk lain, oleh karena banyak binatang misalnya yang sanggup hidup sendiri mandiri tanpa bantuan dari binatang sejenisnya, sedangkan manusia selalu memerlukan orang lain, dan ketergantungan satu sama lain merupakan sesuatu yang tetap dan langeng. Karena firman Allah dalam al-Qur'an, bahwa manusia diciptakan sebagai mahluk lemah. Oleh karenanya, Mawardi berpendapat, bahwa perbedaan bakat, pembawaan dan kemampuan antara manusia yang merupakan pendorong bagi mereka saling membantu. Sebab apa yang tidak bisa dikerjakan oleh seseorang dapat dikerjakan oleh orang lain.

Kelemahan manusia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri, dan terdapat keanekaragaman bakat, pembawaan, kecenderungan alami serta kemampuan, semuanya itu mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu, dan akhirnya sepakat untuk mendirikan negara. Dengan perkataan lainnya, sebab munculnya negara, adalah hajat umat manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama, dan otak mereka yang mengajari cara bagaimana saling membantu dan bagaimana cara mengadakan ikatan satu sama lain.<sup>72</sup>

Menurut Mawardi, ada enam sendi utama dalam ketertiban sosial dan politik negara; (*pertama*), sebuah agama yang mapan, yang

---

<sup>72</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, .....hlm. 60-61.

dapat mengatur nafsu manusia dengan benar. (*Kedua*), seorang penguasa (sultan) yang kuat, karena tidak ada agama atau akal yang cukup untuk mencegah orang dari kesalahan atau ketidakadilan, kecuali jika mereka dipaksa oleh otoritas superior dari seorang penguasa yang kuat. (*Ketiga*), keadilan, untuk menjamin terjaganya hubungan cinta dan ketundukan yang saling menguntungkan antara rakyat dengan penguasa (dan menciptakan) kemakmuran negara. Hal ini meliputi keadilan dalam perilaku keseharian, baik pada pihak yang superior termasuk Tuhan, maupun pada pihak setara. Mengikuti Miskawaih, ia menyebutnya “kesamaan atau kesejajaran (*i'tidal*). Sebuah titik tengah antara dua titik ekstrim”. Kemudian kita membutuhkan, (*keempat*), hukum dan tata tertib, yang menghasilkan rasa aman universal, (*kelima*), kemakmuran ekonomi secara umum, yang berakar pada berlimpahnya sumber daya, (dan) banyaknya pendapatan. Gagasan ini merupakan elaborasi terhadap konsep Lingkaran Kekuasaan, yang oleh Mawardi di tambah dengan, (*keenam*), harapan orang banyak akan terpeliharanya berbagai aktifitas produksi, serta peradaban dan kemajuan yang bersinambungan. Agama, kekerabatan, dan cinta merupakan dasar saling menyayangi yang menjadi sandaran untuk pembentukan solidaritas sosial.<sup>73</sup>

Allah SWT menggariskan bahwa dalam umat harus ada pemimpin yang menjadi pengganti dan pelanjut fungsi kenabian,

---

<sup>73</sup> Antony Black, *Pemikiran Politik Islam...*, hlm. 171.

menjaga terselenggaranya ajaran agama, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang dilandasi syari'at agama, dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal. *Imamah* (kepemimpinan negara) adalah dasar dari terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya kemaslahatan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman sejahtera.<sup>74</sup> Oleh karenanya, Mawardi yang dimaksud dengan imam, adalah khalifah, raja, sultan atau kepala negara, dan dengan demikian Mawardi juga memberikan baju agama kepada jabatan kepala negara disamping baju politik. Karena menurutnya, Allah mengangkat untuk umatnya seorang pengganti (khalifah) nabi, untuk mengamankan agama, dengan disertai mandat politik. Dengan demikian seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama, dan dilain pihak pemimpin politik.<sup>75</sup>

Sistem politik yang dibangun oleh Mawardi, menganggap kekuasaan kepala negara berasal dari kontrak sosial yang melahirkan hak dan kewajiban kepala negara dan rakyat. Dengan demikian Mawardi dianggap sebagai pelopor pertama untuk teori kontak sosial. Mawardi adalah satu-satunya tokoh yang menguraikan proses pemilihan dan pengantian kepala negara. Ia, mengemukakan kemungkinan di jatuhnya kepala negara, apabila ia tidak

---

<sup>74</sup> Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara*, .....hlm. 14.

<sup>75</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, .....hlm. 63.

mampulagi memerintah karena faktor jasmani, rohani, akhlak<sup>76</sup>, atau sudah menyimpang dari keadilan, dan kehilangan kebebasan bertindak karena telah dikuasai oleh orang-orang dekatnya atau tertawan.<sup>77</sup>

b. Syekh Muhammad Rasyid Ridha (1282 H./1865 M.- 1935 M.)

1. Biografi Singkat

Sosok intelektual satu ini bernama lengkap Muhammad Rasyid bin Ali Ridha bin Syamsuddin bin Baha'uddin Al-Qalmuni Al-Husaini. Namun, dunia Islam lebih mengenalnya dengan nama Muhammad Rasyid Ridha. Ia lahir di daerah Qalamun (sebuah desa yang tidak jauh dari Kota Tripoli, Lebanon) pada 27 Jumadil Awal 1282 H bertepatan dengan tahun 1865 M. Muhammad Rasyid Ridha dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga terhormat dan taat beragama. Dalam sebuah sumber dikatakan bahwa Rasyid Ridha nasabnya sampai kepada Ahlul Bait dan masih memiliki pertalian darah dengan Husein bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW.<sup>78</sup> Muhammad Rasyid Ridha wafat pada tahun 1935, setelah menghadiri kongres yang membicarakan kehadiran masyarakat Yahudi di Palestina dan mendirikan univesitas Islam disana.<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> Drs.Abdul Azis Thaba,M.A, *Islam dan Negara dalam Politik*, .....hlm. 109.

<sup>77</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, .....hlm. 65.

<sup>78</sup> <http://tokoh-ilmuwan-penemu.blogspot.com/2010/02/tokoh-pembaharu-muhammad-rasyid-ridha.html>.

<sup>79</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, .....hlm. 124.

Semasa kecil ia dimasukkan ke madrasah tradisional di al-Qalamun untuk belajar menulis, berhitung dan membaca al-Qur'an. Di tahun 1882, ia meneruskan pelajaran di al-Madrasah al-Wathaniyah al-Islamiyah (sekolah Nasional Islam) milik Syaikh Husain al-Jisr, yang terletak di Tripoli. Di madrasah ini, selain bahasa Arab, diajarkan pula bahasa Turki dan Perancis, dan juga, selain pengetahuan-pengetahuan agama, juga diajarkan pengetahuan-pengetahuan modern. Setelah itu, Rasyid Ridha meneruskan pelajarannya di salah satu sekolah agama yang berada di Tripoli, walaupun demikian, hubungannya dengan Syaikh Husain al-Jisr tetap berjalan, dan guru inilah yang menjadi pembimbing baginya di masa muda. Selanjutnya, ia banyak dipengaruhi oleh ide-ide Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh, yaitu melalui majalah *al-Urwah al-Wutsqo*.<sup>80</sup>

Memang sejak membaca tajuk-tajuk karangan dalam majalah *al-Urwah al-Wutsqo* telah terjadi perubahan dalam orintasi keagamaan Ridha. Menurut pengakuannya sendiri, tiap membaca majalah itu, yang ia dapatkan dari sahabat karibnya Abdul Kadir Maghribi, hatinya tersentuh, tergetar, dan emosional. Pada tahun 1892 di berusaha menemui Afghani, untuk berguru dan mengabdikan diri dalam gerakan pembaharuan Islam. Tapi dalam kenyataannya, Ridha tidak bisa ketemu Afghani, harus cukup puas bertemu dengan "khalifah" Afghani, Muhammad Abduh. Ridha bertemu pertama kali dengan

---

<sup>80</sup> <http://poetraboemi.wordpress.com/2008/04/24/rasyid-ridha/>.

Abduh pada akhir tahun 1882 sewaktu yang disebut terakhir ini diusir dari Mesir dan datang ke Beirut. Perkenalan yang sebenarnya dan yang mempengaruhi pandangan keagamaan dan politiknya adalah sewaktu Abduh kembali ke Beirut dari Eropa tahun 1885 dan sebelum pulang ke Mesir pada tahun 1889.

Pergaulan Ridha dengan Abduh, mendorong Ridha untuk meyakini kebenaran gerakan *Salafiyah*<sup>81</sup> yang dipelopori oleh Afghani dan Abduh. Dalam perjalanannya, Ridha dapat meyakinkan Abduh untuk menerbitkan majalah sebagai corong dalam gerakan pembaharuan Islam, maka diterbitkanlah majalah mingguan *Al-Manar* dibawah asuan Abduh dan Ridha.

Setelah sepeninggal Abduh, Ridha melanjutkan apa yang dirintis bersama-sama gurunya, yakni pembaharuan keagamaan, dengan meneruskan penerbitan majalah *Al-Manar*. Selain itu Ridha juga lebih aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik dunia Islam. Sepeninggal gurunya Abduh, Ridha lebih mandiri dalam berfikir, terlihat dari hasil karyanya tafsir Al-Qur'an *al-Manar*.<sup>82</sup>

## 2. Kondisi Sosial Politik

Pada masa hidupnya Ridha, sistem pemerintahan saat itu masih dikuasai oleh kerajaan Utsmani. Dan percaturan politik ada pada peralihan antara, dipertahankannya kekuasaan di pegang Arab atau

<sup>81</sup> *Salafiyah* adalah, suatu aliran keagamaan yang berpendirian bahwa untuk dapat memulihkan kejayaannya, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang masih murni seperti yang dahulu diamalkan oleh generasi pertama Islam, yang bisa disebut *salaf* (pendahulu) yang saleh.

<sup>82</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, .....hlm. 122-123.

nasionalisme Arab dan kekuasaan baru dengan pemerintahan kekhalifahan Turki.

Ketika Ridha tidak dapat melanjutkan pendidikan di sekolahannya, karena mendapat tantangan hebat dari kerajaan Utsmani dan sekolahannya harus ditutup. Tetapi pendidikannya tetap berlanjut kepada gurunya Syekh Husain al-Jisr berada di Syiria, dan Muhammad Adbuh kebanyakan berada di Mesir.

Dengan bekal keilmuan yang dimiliki Ridha pada waktu di Syiria, Ridha melancarkan ide-ide pembaharuan, tetapi usaha-usahanya mendapatkan tekanan dari kerajaan Utsmani. Hal ini yang membuat Ridha harus pindah ke Mesir, negara gurunya Muh. Abduh. Tetap masih dalam melancarkan ide-ide pembaharuan, dalam bidang agama, sosial, ekonomi, mengikis tahayul, khurafat, dan bid'ah yang merusak ajaran Islam, meleyapkan faham fatalisme, dan faham-faham yang salah lainnya, membela umat Islam menghadapi politik kotor negara-negara Barat, dan meningkatkan kualitas pendidikan Islam.<sup>83</sup>

Dalam ide-ide pembaruannya, Ridha juga aktif dalam kegiatan-kegiatan politik dunia Islam. Dalam periode ini, Ridha melakukan delapan kali perjalanan keluar Mesir. Baik dalam dakwah Islam maupun dalam kegiatan politiknya. *Pertama*, perjalanan ke Istanbul, dalam mempersatukan kelompok Turki dan kelompok Arab setelah Abdul Hamid turun tahta. *Kedua*, ke India dalam mencari dukungan

---

<sup>83</sup> Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, Jilid. 3, (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), hlm.996-998.

dana untuk pendirian lembaga pendidikan *Jam'iyah al-Da'wah wal Irsyad*. *Ketiga*, tahun 1916 sementara Perang Dunia I masih berlangsung, pergi ke Hijaz untuk menunaikan ibadah haji dan mengucapkan selamat kepada Syarif Husain, atas keberhasilannya memberontak terhadap kekuasaan Turki. *Keempa*, tahun 1919, se usai Perang Dunia I, ke Suria yang dikuasai pasukan sekutu dan Pangeran Faisal putra Syarif Husein, yang dinobatkan Inggris sebagai raja. Ridha datang ketempat itu untuk menghadiri Kongres Suria Raya, untuk menuntut kemerdekaan penuh untuk wilayah itu. Ini yang merupakan kunjungan kedua sejak Ridha pindah ke Mesir. Dimana Prancis menduduki Damaskus dan raja Faisal pergi ke Suria. *Kelima*, pada tahun 1925, Ridho menjadi anggota Partai Persatuan di Kairo pergi ke Jenewa untuk ikut dalam kongres Suria-Palestina. *Keenam*, pada tahun yang sama pergi ke Hijaz, untuk kedua kalinya. Untuk menghadiri Kongres Islam dalam pembicaraan pemerintahan Islam dan jabatan khilafah. Waktu itu Hijaz di kuasai raja Abduk Aziz bin Saud, setelah berhasil mengusir Syarif Husain. *Ketujuh*, ke Plestina untuk menghadiri kongres yang membicarakan kehadiran masyarakat Yahudi di Palestina dan mendirikan universitas Islam.<sup>84</sup>

Kiprah Rasyid Ridha dalam dunia politik secara nyata dapat dilihat dalam aktivitasnya. Ia pernah menjadi Presiden Kongres Suriah pada 1920, menjadi delegasi Palestina-Suriah di Jenewa tahun 1921. Ia

---

<sup>84</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, .....htm. 123-124.

juga pernah menjadi anggota Komite Politik di Kairo tahun 1925, dan menghadiri Konferensi Islam di Mekah tahun 1926 dan di Yerusalem tahun 1931. Pengaruh pemikiran Rasyid Ridha dan juga para pemikir lainnya berkembang ke berbagai penjuru dunia Islam, termasuk Indonesia. Ide-ide pembaharu yang dikumandangkan banyak mengilhami semangat pembaharuan di berbagai wilayah dunia Islam. Banyak kalangan ulama yang tertarik untuk membaca majalah *Al-Manar* dan mengembangkan ide yang diusungnya. Nama besarnya terus dikenang hingga beliau wafat pada Agustus 1935.<sup>85</sup>

Setelah melakukan pengembaraan yang cukup jauh, ia menaruh harapan pada reformasi agama generasi muda Turki. Karena kecewa dengan mereka, Ridha kembali ke Pan Arabisme (1911-1912), ia mendukung pemberontakan Arab dan, ketika Syarif Makkah mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah (1916), ridha mendukungnya. Dia menyambut baik tahapan-tahapan awal revolusi Turki. Ia menyatakan, “ ketika peradaban Barat ‘di zaman kita mulai runtuh’ fenomena 1914-1918 telah di kenal luas pemerintah Islam Turki, “yang telah menunjukkan bakat yang paling berlian dalam seni perang”, dapat mencapai hasil yang cukup positif “jika pemerintah mau meningkatkan reformasi muslim”.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> <http://tokoh-ilmuwan-penemu.blogspot.com/2010/02/tokoh-pembaharu-muhammad-rasyid-ridha.html>.

<sup>86</sup> Antony Black, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi*, .....hlm. 567.

Tetapi dalam perjalanannya, politik yang ada di Turki mengalami pelencengan dari apa yang di harapkan Ridha, *Jami'ah Islamiyah* yang merupakan lembaga Utsmaniyah murni (di dukung Ridha) yang mempersatukan umat Islam dalam bentuk khilafah, dalam menghadapi kekuatan dan ancaman dari kekuatan asing.

Politik yang terjadi di Turki, keyakinan Ridha bahwa lembaga khilafah harus di pertahankan. Tetapi yang terjadi, khilafah yang beru di bentuk tersebut harus di bekukan oleh Mustafa Kamal, kepada Sultan di tahun 1922, dan digantikan oleh kilafah-khilafah yang hanya mempunyai kekuasaan spiritual. Baru pada tahun 1924 Mustafa Kamal secara resmi menghapuskan lembaga kilafah.<sup>87</sup>

Karena *Jami'ah Islamiyah* adalah pemersatu umat Islam, dan kekuatan utamanya ada di Turki dan Arab, seadangkan politik di Arab sendiri muncul nasionalisme Aran atau *Pan-Arabisme*. Kekawatiran yang dirasakan oleh Ridha adalah, *Pan-Arabisme* ini tidak akan bisa bersatu dengan Turki, dan memperlemah kekuatan Utsmaniyah. Serta mengancam dari kekuatan dunia Islam.

Setelah itu juga, Kabinet Baru Utsmaniyah yang di bentuk oleh kelompok *Al-Ittihad wa al-Taraqi* juga mengecewakan Ridha, karena perlakuan sewenang-wenang oleh pemerintahan baru itu, khususnya kepada rakyat bukan Turki (bangsa Arab), pembebanan pajak dan pungutan tambahan, dan terakir kebijaksanaan pemerintah yang

---

<sup>87</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, .....hlm. 127.

membiyarkan negara asing Italia mengambil kota Tripoli, Libiya, pada tahun 1911.

### 3. Pemikiran Politik Islam

Politik Islam yang dibangun oleh Rasyid Ridha dalam pembaharuan Islam, tidak jauh berbeda dengan politik Islam yang di bawa Muhammad Abduh, maupun al-Afghani. Boleh di bilang pemikiran Ridha adalah pengabungan dari kedu pemikir tersebut.

Menurut al-Afghani, tidak ada jalan yang paling ampuh dalam pembaharuan dunia Islam kecuali melalui jalan politik, sedangkan menurut Abduh, pembaharuan di dunia Islam akan berhasil apa bila dilakukan pembaharuan di dalam tubuh umat melalui pendidikan dan pengajaran. Ridha melihat kedua jalan itu sama-sama ampuhnya untuk keperluan pembaharuan Islam, sebab pembaharuan melalui politik merupakan jalan terpendek, sedangkan pembaharuan melalui jalan pendidikan dan pengajaran sekalipun menempuh jalan yang panjang tetapi mantap dan langeng.<sup>88</sup>

Sebenarnya kedua hal tersebut sangat berkaitan, sebab jika pembaharuan tidak dilakukan maka umat Islam akan berada dalam kejumudan dan jadi umat terlantar. Kemunduran dan keterbelakangan umat Islam terjadi karena, umat Islam tidak bisa memegang dan menjalankan ajaran Islam secara benar. Islam yang di masuki faham-

---

<sup>88</sup> Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, .....hlm. 997.

faham seperti tahayul dan khurafat, fatalisme, bid'ah dan ajaran lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut Ridha, kemunduran umat Islam juga di pengaruhi oleh tidak bisanya memaksimalkan akal dalam ijtihad. Menurut Ridha, dalam agama perlu adanya ijtihad, terutama dalam bidang mu'amalat dalam memacu pembangunan Islam. Umat Islam menurutnya, harus berani mengambil dan mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di Barat, umat Islam klasik mengalami kemunduran karena meninggalkan ilmu pengetahuan. Dan Barat maju karena mereka berani mengambil ilmu pengetahuan yang di kembangkan Islam.

Dalam memajukan umat Islam ini, Ridha melihat agar umat Islam mengalang persatuan di kalangan mereka. Kesatuan umat itu harus mengambil bentuk negara yang dipimpin oleh seorang khalifah. Profil khalifah yang dimaksud Ridha adalah orang yang mempunyai sifat Mujtahid besar.<sup>89</sup>

Persatuan umat Islam dunia tersebut (*Jami'ah Islamiyah*) didasarkan pada solidaritas akidah Islam, bertujuan membina kesetiakawanan dan persatuan umat Islam dalam perjuangan; *Pertama*, mementang tiap sistem pemerintahan (di negeri sendiri) yang despotik dan sewenag-wenang, dan mengantikannya dengan sistem

---

<sup>89</sup> Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, .....hlm. 998.

pemerintahan yang berdasarkan musyawarah seperti yang diajarkan oleh Islam. *Kedua*, menentang kolonialisme dan domiansi Barat.<sup>90</sup>

Dalam menjalankan dan mewujudkan *Jami'ah Islamiyah* dengan peran khalifah, Ridha dalam karyanya *al-khilafah*, ia mengingatkan kembali agar pengembangan kembali moralitas sosial harus didasarkan semata-mata atas syari'at "yang merupakan dasar seluruh legislasi manusia". Kekhalifahan, dia berargumen, sangat dibutuhkan, yang tentu saja fungsinya adalah memenuhi kepentingan duniawi dan mengatur urusan agama kaum muslim.

Dalam konstitusi kekhalifahan, pemilihan dan musyawarah adalah prinsip dasar yang tidak boleh di tinggalkan. "kepatuhan yang sebenarnya hanya kepada Tuhan, dan kekuasaan yang memaksa telah diberi (yakni oleh tuhan) kepada *badan sosial umat*. Ridha berpendapat bahwa "semua yang dimiliki hukum (Eropa), yang baik dan adil, telah di tetapkan oleh syariat kita sejak lama. Ini memungkinkannya untuk memutuaskan berdasarkan kriteria tradisional muslim seberapa jauh ia ingin mendefinisikan kedaulatan rakyat menurut pengertian Barat.

Kekhasan dari Ridha kelihatanya adalah bahwa ia telah mengubah bobot relatif yang dilekatkan kepada tradisi Eropa dan

---

<sup>90</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, .....hlm. 126.

Islam, jelasnya ketertarikan Ridha pada sumber-sumber Islam telah menafikan, atau setidaknya mengabaikan, pengaruh Barat.<sup>91</sup>

c. A'la Maududi (1321 H./1903 M. - 1978 M.)

1. Biografi Singkat

Abu al-A'la Maududi merupakan salah seorang ulama abad ke-20 dan penggagas *Jamaat e-Islami* (Partai Islam). Maududi, lahir pada 3 Rajab 1321 H. (25 September 1903 M) di Aurangabad, dan beliau wafat pada tanggal 23 September 1979 di salah satu rumah sakit New York, ayah Abu al-A'la al-Maududi ialah Ahmad Hasan yang lahir pada 1855 M, anak bungsu dari 3 kakak beradik. Semasa kecilnya Maududi belajar di rumah, di ajar dan dididik oleh ayahnya sendiri, seorang pengikut sufi yang meninggalkan profesinya sebagai pengacara, oleh karena dalam menjalankan prakteknya dia harus acapkali melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraninya sebagai seorang muslim yang hendak memegang teguh kemurnian moral dan akhlak Islam.<sup>92</sup> Dan Maududi mendapat pendidikan di Madrasah Furqaniyah, sebuah sekolah tinggi terkenal di Hyderabad, bukan sekolah Islam bandar Hyderabad (sekarang Maharashtra) negeri, India. Kemudian melanjutkan pelajaran di *Dar al-Ulum* di Hyderabad. Mahir berbahasa Arab, bahasa Persi, bahasa Inggris, dan bahasa Urdu.

---

<sup>91</sup> Antony Black, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi*, .....hlm. 566-568.

<sup>92</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, .....hlm. 158.

Tahun 1918 ketika usia 15 tahun, mulai bekerja sebagai wartawan dalam surat kabar berbahasa Urdu untuk mencukupi kehidupannya. Tahun 1920, berprofesi sebagai editor surat khabar *Taj*, yang diterbitkan di bandar Jabalpore sekarang negeri Madhya Pradesh, India. Tahun 1921, Maulana Maududi pindah ke Delhi bekerja sebagai editor surat khabar *Muslim* (1921-1923), dan kemudian editor *al-Jam'iyat* (1925-1928), yang diterbitkan oleh Jam'iyat-i 'Ulama-i Hind, sebuah partai politik. Hasil kepimpinannya sebagai editor, *al-Jam'iyat* menjadi surat kabar utama untuk orang Islam di Asia Selatan (India, Pakistan, Bangladesh, Sri Langka dan Maldivé).

Maulana Maududi terlibat membentuk Pergerakan *Khilafah* dan *Tahrik-al Hijrat*, yaitu Persatuan Asia Selatan yang menentang penjajahan kolonial inggris. Beliau memprovokatori Muslim India berhijrah ke Afghanistan untuk menentang pemerintahan British. Zaman itu, Maulana Maududi mulai menterjemahkan buku berbahasa Arab dan bahasa Inggris ke bahasa Urdu. Beliau juga telah menulis buku berjudul *al-Jihad fi al-Islam* (Jihad dalam Islam) diterbitkan secara berkala dengan nama *al-Jam'iyat* tahun 1927. Tahun 1933, Maulana Maududi menjadi editor majalah bulanan terjemah al-Qur'an. Bidang penulisan beliau ialah tentang Islam, konflik antara Islam dengan Imperialisme dan modenisasi. Beliau mengemukakan penyelesaian Islam, dan Islam ada jawapan bagi setiap permasalahan masyarakat Islam yang dijajah.

Bersama dengan ahli filsuf dan ulama Muhammad Iqbal, Maududi menggagas pusat pendidikan Darul-Islam di bandar Pathankot di wilayah Punjab. Pusat pendidikan ini ialah melahirkan pelajar yang mempunyai falsafah politik Islam. Maulana Maududi mengkritik habis konsep-konsep Barat seperti nasionalisme, pluralisme and feminisme di mana semua ide ini adalah alat Barat untuk menjajah umat Islam. Beliau menegaskan ummat islam untuk bisa mandiri, jihad sehingga berjaya menegakkan negara Islam yang *syumul*. Maududi telah menterjemah dan menafsirkan al-Qur'an kebahasa Urdu dan menulis banyak artikel berkenaan undang-undang Islam dan kebudayaan masyarakat Islam.<sup>93</sup>

## 2. Kondisi Sosial Politik

Maududi yang begitu aktif serta kritis mencermati dunia politik, dakwah, kemasyarakatan serta mengemukakan pandangan mengenai keagamaan Islam, baik bagi kepentingan umat Islam di anak benua India (termasuk Pakistan), maupun publikasi ke seluruh dunia. Akan tetapi, dalam karir ia tidak pernah berkerja untuk pemerintahan Inggris yang pada waktu itu masih menjajah India. Ia termasuk pemikir dan pejuang yang tidak mau berkerja sama dengan kolonial Inggris.<sup>94</sup>

Sebelum itu, di tahun 1923, ia berkerja sebagai penyunting majalah *Al-Jam'at*, dan di tahun 1924 Maududi terlibat dalam gerakan

---

<sup>93</sup> <http://satutujuan.multiply.com/journal/item/19/2011/02/10/>.

<sup>94</sup> Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat*, .....hlm. 323.

Khilafah, meski gerakan ini mengalami kegagalan, dalam perkembangan politik di India, pada tahun 1926 terjadinya kerusuhan antar etnis (Hindu dengan Muslim di India red.), dimana yang melatarbelakangi pemikiran Maududi yang fundamentalisme. Demikian pula dengan Liga Muslim, juag sebuah gerakan masa sejak tahun 1927, Maududi tidak percaya bahwa partai itu benar-benar memperjuangkan Islam. Tokoh-tokohnya, menurut Maududi lebih banyak orang oportunistis. Hal ini yang membuat Maududi mendirikan Partai Jamaat-I- Islam yang didirikan sebagai reaksi terhadap pergerakan sosial dan politik yang didominasi oleh kaum “sekuler” maupun modernis. *Pendirian Parta Politik, Partai Jama’at-I-Islam*, partai ini di dirikan 21 Agustus 1941, pertemuan dilakukan di rumah Maududi yang dihadiri 75 orang yang secara sukarela memenuhi undagannya di tengah suasana ketegangan perjuangan anak benua India untuk merdeka dari penjajah Inggris. Kemudian partai ini memindahkan markasnya serta memusatkan aktivitas politik di Pakistan. Awal pendirian Partai Jama’at-I-Islam bersaing dengan Liga Muslim.<sup>95</sup>

Al-Maududi berpendapat bahwa muslim India harus mendirikan negara merdeka sendiri, terpisah dari India. Negara itu bukan negara-negara seperti di Eropa, melainkan sebuah “Negara Islam” dengan ciri khas agama, bukan etnis, dan didasarkan atas

---

<sup>95</sup> Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat*, .....hlm. 328-329.

muasyawarah (*syura*) seperti yang dipraktikan di era awal Islam, yang menunjukkan parlementaris negara modern.<sup>96</sup>

Revolusi pembentukan Pakistan selain mendapat tantangan dari partai kongres dan Hindu Mahashaba yang tetap menginginkan India merdeka sebagai suatu negara. Penentangan ini juga datang dari *Jami'at I-Ulama Hindi*, yang menghimpun alim ulama berpaham tradisional, juga berpihak ke Partai Kongres. Maulana Abdul Kalam Azab, seorang ulama yang berpengaruh masa itu yang juga salah seorang pemimpin Partai Kongres juga menentang pembentukan negara Pakistan. Namun penentangan Maududi agak berbeda dengan dua kelompok di atas, ia lebih melihat disebabkan oleh ketidakpuasannya terhadap keberadaan *Muslim League* yang berkaitan dengan platform perjuangan organisasi itu yang dianggap bukan sebagai Partai Islam melainkan Nasionalisme Muslim.

Maududi termasuk orang yang mementang rencana pembentukan negara Pakistan yang terpisah dari negara India. Awalnya ketika terjadi ketegangan politik yang semakin mencekam di India setelah *Muslim League* mencetuskan apa yang dikenal dengan Resolusi Lahore, pada tahun 1940. Resolusi itu membentuk Pakistan sebagai "tanah air Muslim," sebuah negara yang terpisah dari India. Ketidaksetujuannya disebabkan oleh sikap kritis terhadap ideologi, tujuan, kepemimpinan dan cara-cara Liga Muslim memperjuangkan

---

<sup>96</sup> Antony Black, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi*, .....hlm. 576.

cita-citanya. Maududi menentang Liga Muslim yang menyatakan sebagai partai Islam. Sebab dilihat dari segi ideologi dan kepemimpinan, partai itu lebih banyak menunjukkan ciri-ciri sekuler dari pada bercirikan Islam. Liga Muslim menegaskan bahwa Kebangsaan Muslim (*Muslim Nasionalism*) adalah ideologinya, dan Maududi mempersoalkan apakah paham kebangsaan sesuai dengan ajaran Islam.<sup>97</sup>

Ketika Pakistan lahir pada tahun 1947, Maududi segera pindah ke Pakistan dan mulai memusatkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk ikut mendirikan suatu negara Islam yang benar-benar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Untuk mencapai tujuan itu, untuk kesekian kali karya Maududi “membajiri” dan menyoroti berbagai dimensi ajaran Islam, terutama pada permasalahan-permasalahan sosial politik. Sering kali gagasan-gagasan Maududi bertabrakan dengan beberapa kebijakan pemerintahan Pakistan. Oleh karena itu penjara bagi Maududi bukan tempat tinggal yang asing lagi. Pada tahun 1953 Maududi dijatuhi hukuman mati karena tuduhan “subversif” yang berkaitan dengan masalah sekte Ahmadiyah Qadiani. Namun Maududi bukannya minta naik banding atau minta pengampunan penguasa waktu itu. Dengan semangat gembira ia memilih kematian dari pada meminta pengampunan kepada mereka yang ingin mengantungnya. Ia mengatakan kepada anaknya dan kepada sahabat-sahabatnya: “ Jika

---

<sup>97</sup> Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat*, .....hlm. 324-325.

ajal bagi saya telah datang, tidak seorang pun dapat mengelakkannya; akan tetapi bila ajal itu memang belum datang, mereka tidak akan dapat mengantung saya, walaupun mereka sampai mengantung diri mereka sendiri untuk dapat mengantung saya.”<sup>98</sup>

### 3. Pemikiran Politik Islam

Politik Islam yang pada dasarnya adalah kedaulatan yang ada pada Tuhan, dan implementasinya melalui wahyu-Nya untuk diterapkan dalam segala kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Teori politik Islam al-Maududi pada dasarnya menerapkan segala nilai-nilai kehidupan ada pada konsep Islam. Menurut Maududi asas terpenting dalam Islam adalah *tauhid*, dan seluruh nabi serta rasul Allah mempunyai tugas pokok untuk mengajarkan *tauhid* (ke Esaan Tuhan, *the unity of godhead*) kepada seluruh umat manusia.

Akan tetapi apabila diingat bagaimana para musuh orang-orang beriman menentang tauhid itu dengan segala macam jalan, maka akan sadarlah kita bahwa doktrin-doktrin yang terkandung dalam ajaran itu sangat revolusioner dan mempunyai implikasi sangat jauh dalam mengubah tata sosial, tata politik, dan tata ekonomi yang sudah ada yang tidak bersandikan tauhid tersebut. Jadi tidak aneh apabila kita melihat sejak dahulu terlalu banyak orang yang menentang doktrin-doktrin sosial dan politik yang bersumber pada tauhid, berhubung

---

<sup>98</sup> Abdul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemikiran Islam*, terj. Muhammad al-Baqir, cet. VII, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 9-10.

doktrin-doktrin revolusioner yang bersumber tauhid selalu menentang penindasan, tirani dan pelestarian *vested interest* yang tidak adil.

Ajaran *tauhid* itu sendiri sangat sederhana, "Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu rasul Allah" artinya "Tidak ada Tuhan selain Allah" berarti bahwa seorang manusia menegaskan Allah dan menyembah-Nya di tempat-tempat ibadah dan kemudian manusia itu mempunyai kebebasan penuh untuk berbuat apa saja di luar tempat ibadah dan menghamba pada kekuasaan selain Allah, maka alangkah bodohnya para penguasa di berbagai negara harus mengerahkan kekuatan dan siasatnya untuk menentang *tauhid*.

Masalah pokok yang menjadi pertentangan besar antara nabi dan rasul dengan lawan-lawan mereka bukanlah terletak pada pengingkaran musuh-musuh nabi dan rasul itu terhadap wujud atau eksistensi Tuhan, karena kebanyakan manusia termasuk para musuh rasul-rasul Tuhan juga mengakui eksistensi Tuhan. Bahkan mereka percaya bahwa Tuhan sajalah yang menciptakan jagat raya dan seisinya. Pertentangan antara para rasul Tuhan dengan musuh-musuhnya yang tidak mau beriman itu terletak pada tuntutan al-Qur'an yang sangat tegas agar seluruh manusia mengakui Tuhan sebagai *Rabb* dan sekaligus sebagai *ilah*, dalam bahasa Arab *ilah* berarti Tuhan yang disembah (*ma'bud*). Hubungan manusia dengan ilahinya adalah laksana hubungan antara hamba sahaya yang setia dengan tuannya. Demikian juga dengan manusia yang telah berikrar dengan *La ilaha illallah*,

berarti telah bersedia mematuhi kehendak Allah dan tidak akan mengukui kekuasaan selain kekuasaan Allah. Sedangkan *rabb* dalam bahasa Arab berarti Tuhan yang memelihara, mengatur, mengasihi, dan menyempurnakan. Hubungan antara manusia dengan rabb-nya harus ditandai dengan kepasrahan, ketaatan, dan ketundukan. Berhubung hanya Allah sajalah yang benar-benar *ilah* dan *rabb*, maka Dia sajalah yang berhak mengklaim ketaatan dan kepasrahan manusia. Di sinilah sesungguhnya letak persoalan yang tidak boleh dilupakan bahwa ketaatan, kepasrahan, ketundukan, dan kesetiaan manusia (*The allegiance of men*) hanyalah untuk Allah belaka dan untuk peraturan-peraturan yang berasal dari-Nya, tidak boleh kesetiaan tunggal itu dilacurkan kepada sesama makhluk.<sup>99</sup>

Dengan demikian menjadi jelas setiap klaim yang dinyatakan oleh para penguasa negara sejak dulu sampai sekarang: bahwa mereka wajib ditaati tanpa *reserve*, adalah batal dengan sendirinya di dalam Islam, bahkan Islam melaknati dan memerangi klaim seperti itu (*the claim to godhood*). Di dalam al-Qur'an contoh kekuasaan yang bermain seperti Tuhan adalah Fir'aun dan raja Namrud.

Banyak sekali penguasa negara bertingkah dan bersikap bagaikan Fir'aun dan Namrud, yang merasa paling benar sendiri dan menuntut ketaatan rakyat secara total tanpa *reserve*. Di zaman modern sekarang para penguasa tidak ada yang mengklaim dirinya sebagai

---

<sup>99</sup> Abdul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*: .....hlm. 13-15.

tuhan, tetapi tuntutan-tuntutan mereka tidak ubahnya dengan tuntutan-tuntutan Tuhan, yaitu kemutlakan kekuasaannya atas rakyat yang diperintah. Otoritas dan kekuasaannya pantang untuk dikritik apalagi ditentang. Anehnya sejarah menunjukkan bahwa pada umumnya rakyat memang mudah ditundukkan dengan ancaman, intimidasi dan bayangan-bayangan mengerikan akibat propaganda yang efektif dari para penguasa.<sup>100</sup>

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an, yang menegaskan bahwa otoritas dan souverenitas tertinggi ada pada Tuhan dan bahwa Tuhan sajalah yang berhak menciptakan hukum<sup>101</sup> maka oleh Maududi diturunkan beberapa prinsip berikut ini. *Pertama*, tidak ada seseorang, sekelompok orang atau bahkan seluruh penduduk suatu negara dapat melakukan klaim atas souverenitas (kedaulatan). Hanya Allah saja yang memegang kedaulatan dalam arti sebenarnya. Seluruh manusia hanyalah pelaksana kedaulatan Tuhan. *Kedua*, Tuhan adalah pencipta hukum yang sebenarnya (*the real law-giver*), sehingga Dia sajalah yang berhak membuat legislasi secara mutlak. Manusia diperkenankan membuat legislasi sepanjang legislasi itu tidak bertentangan dengan legislasi dasar yang berasal dari wahyu. Secara demikian kita tidak dapat melakukan modifikasi atas hukum yang telah ditetapkan Tuhan, walaupun rencana modifikasi itu disetujui

---

<sup>100</sup> Abdul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*: .....hlm. 16.

<sup>101</sup> Lihat QS. 12:40; 3:154 dan 79; 16:116.

secara aklamasi oleh seluruh anggota perwakilan rakyat misalnya. *Ketiga*, suatu pemerintahan yang menjalankan peraturan-peraturan dasar dari Tuhan sebagaimana diterangkan oleh nabi-Nya wajib memperoleh ketaatan rakyat, karena pemerintah seperti itu pada prinsipnya bertindak sebagai badan politik yang memberlakukan peraturan-peraturan Tuhan.<sup>102</sup>

Rakyat dalam teori politik Islam Maududi, tidak dapat dan tidak boleh menggunakan kedaulatannya itu dengan semau-maunya, karena ada peraturan-peraturan Tuhan, norma-norma dan nilai-nilai Ilahi yang harus ditaati. Malahan norma-norma dan nilai-nilai Ilahi itu harus menjadi paradigma program-program sosial, politik, dan ekonomi yang ditentukan oleh rakyat lewat para wakilnya. Dari pengertian prinsipial ini Abdul A'la Maududi kemudian menciptakan istilah *theo-democracy* untuk menyimpulkan konsep politik dan pemerintahan dalam Islam. Secara esensial *theo-democracy* Islam itu berarti bahwa Islam memberikan kedaulatan kepada rakyat, akan tetapi kadaulan itu tidak mutlak karena dibtasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Dengan kata lain kedaulatan rakyat terbatas di bawah pengawasan Tuhan, atau *a limited popular sovereignty under the suzerainty of God* seperti di istilahkan oleh Maududi.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Abdul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*: .....hlm. 21-22.

<sup>103</sup> Abdul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*: .....hlm. 23-24.

Dalam mendefinisikan bentuk Negara Islam, Maududi hanya meminjam dari Barat. Negara Islamnya akan dijalankan oleh mesin pemerintah yang modern, presiden yang terpilih, parlemen, dan kehakiman yang serba bisa. Hubungan antar cabang ini akan diatur dengan *check and balance* yang ditentukan oleh konstitusi. Maududi juga mendukung Islamisasi masyarakat sebelum menciptakan Negara Islam, karena jika Negara diIslamisasikan sebelum masyarakat, maka Negara akan terpaksa menggunakan otokrasi (lawan dari demokrasi) untuk memaksakan kehendaknya pada masyarakat yang belum siap dan keberatan. Dengan demikian, ini juga malapetaka bagi proses transformasi social-politik.<sup>104</sup>

Tujuan suatu negara di dalam ajaran Islam berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul, menurut Maududi menerangkan tujuan didirikannya negara: *Pertama*, untuk mengelakkan terjadinya eksploitasi antar manusia, antara kelompok atau antar kelas dalam masyarakat. *Kedua*, untuk memelihara kebebasan (ekonomi, politik, pendidikan, dan agama) para warga negara dan melindungi seluruh warga negara dari invansi asing. *Ketiga*, untuk menegakkan sistem keadilan sosial yang seimbang sebagaimana dikehendaki al-Qur'an. *Keempat*, untuk memberantas setiap kejahatan (*munkarat*) dan mendorong setiap kebajikan yang dengan tegas telah digariskan pula oleh al-Qur'an. *Kelima*, menjadikan negara itu sebagai tempat tinggal

---

<sup>104</sup> <http://brigdhero.wordpress.com/2010/08/02/membumikan-kedaulatan-tuhan-ke-wilayah-demokrasi-dalam-perspektif-abu-a%E2%80%99la-maududi>.

yang teduh dan mengayomi bagi setiap warga negara dengan jalan pemberlakuan hukum tanpa dikriminasi.<sup>105</sup>

## 2. Aliran Pemikir Sekular

Pendapat kedua ini berpendirian bahwa, Islam adalah sebagai suatu agama, samasekali tidak ada hubungannya dengan masalah politik dan ketatanegaraan. Menurut aliran ini nabi Muhammad, hanyalah seorang rosul biasa seperti halnya rosul-rosul sebelumnya, dengan tugas hanya untuk megajak manusia untuk kembali kepada kehidupan muliya dan berperkerti baik. Nabi Muhammads, menurut pendapat golongan ini, tidak pernah bertugas dan atau bermaksud untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Pemikir politik Islam yang menganut paham ini adalah;

### a. Ali Abd al-Raziq

#### 1. Biografi Singkat

Al-Raziq lahir di Propinsi Menya, Mesir Tengah pada tahun 1888.<sup>106</sup> Dia berasal dari keluarga bangsawan yang berdiam di As Sha'id. Ayahnya, Hasan 'Abd al-Raziq Pasha adalah seorang pembesar yang terpandang di daerah pinggiran.<sup>107</sup> Al-Raziq merupakan adik kandung seorang filsuf Islam ternama yaitu Mustaha al-Raziq.

Al-Raziq sebagaimana saudaranya Mustafa al-Raziq adalah murid Syiikh Muhammad Abduh, meskipun tidak sampai belajar

<sup>105</sup> Abdul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*:.....hlm. 31.

<sup>106</sup> Zaid Su'di, *Islam dan Dasar-dasar Pemerintahan*, (Yogyakarta: Jendela, 2002), hlm. 90.

<sup>107</sup> Dhiya adh Din ar-Rais, *Islam dan Khilafah*, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 24.

banyak darinya karena ketika 'Abduh meninggal dunia pada tahun 1905 al-Raziq masih berusia 17 tahun. Al-Raziq memulai pendidikannya ketika ia berusia 10 tahun.<sup>108</sup> Ia belajar hukum dan peradilan dari Syeikh Ahmad Abu Khatwa, sahabat 'Abduh yang juga murid Jamaluddin al-Afghani. Dan pada tahun 1911 ia memperoleh gelar sarjana dari Universitas al-Azhar. Selama lebih kurang dua tahun ia mengikuti perkuliahan di al-Jami'ah al-Mishriyyah.

Karir politik al-Raziq di mulai pada tahun 1907 dengan menggabungkan diri bersama partai rakyat. Suatu partai yang didirikan sebagai tandingan dari partai kebangkitan yang mempunyai hubungan erat dengan pemerintahan Inggris dan jabatan yang didudukinya adalah wakil ketua.<sup>109</sup> Al-Rziq dikenal sebagai ilmuwan agama yang mempunyai kemampuan intelektual yang cukup memadai, sehingga ia diangkat sebagai Hakim di Mahkamah Syariah Mesir (1915) di wilayah Iskandariyyah, sekaligus menjadi menteri wakaf Mesir. Selama menjadi hakim al-Raziq sempat melakukan serangkaian penelitian tentang pemerintahan dalam Islam yang kemudian dituangkannya dalam sebuah buku yang kontroversial *al-Islam wa Ushul al-Ahkam* pada tahun 1925 yang mengandung kritik dan kecaman. Hal ini menggambarkan betapa kehadiran buku tersebut betul-betul menciptakan gelombang dahsyat dalam percaturan politik

---

<sup>108</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*....., hlm. 139.

<sup>109</sup> Dhiya adh Din ar-Rais, *Islam dan Khilafah*, .....hlm. 25.

Mesir khususnya dan dunia Islam pada umumnya, serta tokoh paling kontroversial pada zamannya.

Informasi tentang Ali 'Abd al-Raziq sendiri setelah kemunculan buku tersebut tidak banyak, karena memang setelah buku itu tidak ada lagi tulisannya yang representatif. Demikian pula tentang masa akhirnya, kecuali diketahui bahwa ia meninggal pada tahun 1966 M.<sup>110</sup> hal ini bisa jadi merupakan indikasi bahwa pengaruh kualitas pribadinya tidak begitu berarti bagi tokoh-tokoh selanjutnya. Apa lagi tidak ada keterangan tentang siapa muridnya, sebab seringkali besar kecilnya pengaruh seorang tokoh diukur dengan kiprah dan kualitas murid-muridnya.

## 2. Kondisi Sosial Politik

Berbeda dengan saudaranya, Mustafa al-Raziq yang pernah menjabat sebagai rektor al-Azhar (1945-1947), al-Raziq menjalani hidupnya dengan ketidakpastian. Pada tahun 1925 nasib dunia politik Islam tenggelam, termasuk negara Islam tertentu yang tidak langsung berada di bawah kekuasaan Eropa. Ketika Turki mengalami kemunduran selama PD I, Kemal at-Taturk merubah Dinasti Usmani dan menghapuskan sistem khilafah. Akibatnya pada bulan Mei 1926 diselenggarakan kongres khilafah di Kairo oleh sekelompok ulama Mesir yang dipimpin rektor al-Azhar, yang akhirnya menyepakati bahwa khilafah adalah bagian integral umat Islam. Namun

---

<sup>110</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, .....hlm. 139.

kenyataannya institusi itu tidak dapat dilaksanakan kecuali pada saat yang lebih tepat di masa yang akan datang dan belum pasti, yang mungkin seorang khilafah dapat dipilih oleh Dewan Perwakilan Umat Islam.<sup>111</sup>

### 3. Pemikiran Politik Islam

Ada tiga pokok pemikiran: *Pertama*, Khilafah dan Islam. Pada bagian ini al-Raziq menguraikan definisi khilafah atau lembaga khilafah beserta ciri khususnya. Kemudian dipertanyakan anggapan para ulama yang memiliki paham bahwa mendirikan pemerintahan dengan pola khilafah merupakan suatu keharusan (agama) dan akhirnya dikemukakan bahwa dari segi agama maupun rasio, pola pemerintahan tidak perlu. Berbeda dengan ulama lain, al-Raziq menolak anggapan bahwa khalifah adalah suatu pola pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi dan mutlak berada pada seorang kepala negara dengan gelar khalifah yang berfungsi sebagai pengganti Nabi SAW dengan kewenangan untuk mengatur urusan umat baik dalam keagamaan maupun keduniawian. Penolakan ini disebabkan karena al-Raziq memandang bahwa ortodoksi khilafah tidak jauh berbeda dengan sistem kerjaan yang kekuasaannya diperoleh melalui fanatisme dan kekerasan senjata.<sup>112</sup> Khilafah hanya sekedar bahasa politik yang mencoba memanipulasi agama demi kekuasaan. Ia hanya

---

<sup>111</sup> Maryam Jameelah, *Islam and Modernism*, terj. A. Jaenuri dan Syafiq A. Mughni, (Surabaya: Usaha Nasional: tt), hlm. 202.

<sup>112</sup> Ali Abd al-Raziq, *Al-Islam wa Ushul al-Ahkam*, (Mesir: Maktabah Mishriyyah, tt), hlm. 2.

merupakan bencana bagi Islam dan melahirkan kebobrokan. Meskipun dengan beberapa pengecualian misalnya pada masa Abu Bakar, Umar dan Usman, karena setelah itu khilafah hanya sekedar menjadi fanatisme Arab yang dicoba untuk tetap dipertahankan. Pengertian khilafah dan kerajaan menjadi rancu bersama lenyapnya fanatisme Arab dan generasi mereka, maka lenyap pula tradisi warisan kekhalifahan dan tinggal nama belaka.

Para ulama berpendapat, bahwa fungsi seorang khilafah sesuai dengan nash-nash ajaran agama dengan dasar QS. An Nisa': 59 dan 83, juga fungsi khilafah ini hukumnya wajib berdasar syara' yang ditetapkan melalui ijma'. Namun menurut al-Raziq kedua ayat tersebut hanyalah dalil bagi keharusan kaum Muslimin untuk memiliki sekelompok orang yang bisa dijadikan sebagai tempat bertanya dan memecahkan masalah. Walau ia mengakui ijma' sebagai sumber hukum Islam, namun menurutnya pengangkatan penguasa sejak Abu Bakar sampai zaman dia sendiri tidak pernah dilakukan ijma. Singkatnya al-Raziq menolak semua argumen bagi wajibnya khilafah dan menyatakan bahwa bentuk pemerintahan itu tidak harus khilafah, karena persoalan pemerintahan adalah persoalan duniawi dan persoalan duniawi tidak membutuhkan khilafah yang telah membuat umat Islam mundur dan statis.

*Kedua*, Pemerintahan dan Islam. Dalam bagian kedua ini terdapat uraian tentang perbedaan antara risalah atau misi kenabian

dengan pemerintahan dan berakhir dengan kesimpulan bahwa risalah kenabian itu bukan pemerintahan dan bahwa agama itu bukan negara. Dalam hal ini al-Raziq menolak keras anggapan bahwa Nabi SAW adalah seorang rasul sekaligus raja. Hal ini merujuk pada pengertian tentang sistem imperium dan kemaharajaan yang dipahami sebagai bentuk kekuasaan yang dipertahankan melalui ujung pedang dengan kekerasan dan paksaan. Al-Raziq kemudian mengutip ayat al-Qur'an<sup>113</sup> yang menyatakan bahwa tugas Nabi SAW terbatas pada berdakwah dan mengajak manusia mencari keselamatan duniawi dan ukhrawi dengan menerima Islam, dan Allah tidak memberikan hak kepada Nabi SAW memaksa orang masuk Islam. Memang benar Islam menghormati kebebasan orang beragama tetapi sekali orang memilih Islam maka atasnya berlaku syariah Islam yang sebagian dari pelaksanaannya memerlukan campur tangan penguasa yang mengawasi tindakannya dan menjatuhkan sanksi sebagaimana lazimnya kepala negara. Pada masa Nabi SAW (di Madinah), beliaulah penguasa yang dimaksud itu.

Tidak adanya konsistensi al-Raziq dalam pandangan-pandangannya semakin jelas ketika dia mengatakan bahwa negara yang dipimpin Abu Bakar adalah suatu negara sekular. Padahal cara-cara pengelolaan negara pada zaman Abu Bakar belum banyak berbeda dengan zaman Nabi SAW. Corak kontroversial ini

---

<sup>113</sup> QS. Al-Maidah (5): 92.

berkelanjutan pada pernyataannya bahwa Nabi SAW adalah nabi semata seperti halnya para nabi sebelumnya. Sedangkan pada halaman lain dalam bukunya dia mengatakan bahwa walaupun sebagian besar dari para nabi sebelum Muhammad adalah nabi biasa, tetapi juga terdapat rasul-rasul yang sekaligus memainkan peranan politik sebagaimana layaknya seorang raja.

*Ketiga, Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam.* Dalam bagian ketiga ini diuraikan tentang lembaga khilafah dan pemerintahan dalam lembaran sejarah dunia Islam. Di sini al-Raziq berusaha membedakan antara Islam dan Arab, antar khilfh Islamiyyah dan negara Arab serta antara agama dan politik. Bagi al-Raziq Islam adalah seruan suci yang diturunkan Allah SWT untuk kebaikan umat manusia di seluruh penjuru dunia dan bukan seruan yang khusus untuk bangsa Arab, meskipun Allah telah menetapkan bagi seruan agama itu seorang rasul yang berasal dari suku bangsa Arab dan bukan dari bangsa lain, juga kitab suci berbahasa Arab dan bukan dengan bahasa yang lain, Islam adalah Islam, Islam bukanlah Arab.

Persoalan politik bukanlah termasuk misi kenabian, karena sepanjang hidupnya Nabi SAW tidak pernah menunjuk seorang pun untuk menjadi penggantinya. Lebih dari itu beliau tidak pernah mengisyaratkan sesuatu apapun tentang “negara Islam” atau “negara Arab” sampai beliau wafat. Kepemimpinan pada masa Nabi SAW adalah kepemimpinan dalam bentuk keagamaan, dan setelah beliau

wafat kepemimpinan adalah sama sekali baru, karena tidak seorang pun yang bisa menggantikan risalahnya. Selanjutnya setelah Nabi SAW wafat, disintegrasi Arab muncul lagi ke permukaan. Persaingan antar suku yang menjadi tradisi masa lampau kembali terulang dalam bentuk pertentangan antara kaum Muhajirin dan Anshar serta para pembesar sahabat sebelum akhirnya Abu Bakar terpilih menjadi raja pertama dalam sejarah Islam yang dibentuk berdasarkan fanatisme Arab dan yang memimpin negara Arab dan pemerintahan Arab pula.

Titik tolak kesalahpahaman terhadap negara Arab yang sekular menjadi bercorak keagamaan itu adalah ketika akhirnya Abu Bakar menggunakan gelar khalifah rasulullah dalam praktik politiknya. Sejak itu negara Arab yang dipimpin oleh Abu Bakar diletakkan di bawah panji-panji Islam dan yang memberontak kepadanya berarti juga membangkang perintah agama, murtad dan kafir.

Di hadapan perdebatan seputar agama dan negara, al-Raziq menyatakan bahwa agama Islam tidak mengenal lembaga kekhalifahan seperti di atas. Islam tidak pernah mengenal adanya segala bentuk intimidasi dan kesewenang-wenangan. Itu adalah wilayah politik dan politik sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama. Agama tidak menerima maupun menolaknya, tidak memerintahkan dan juga tidak melarangnya, hal ini terserah kepada pertimbangan akal, pengalaman bangsa-bangsa dan kaidah-kaidah politik. Agama Islam tidak berhubungan sama sekali dengan aturan

politik dan begitu pun sebaliknya. Lebih jauh al-Raziq menyatakan bahwa sistem khilafah yang rigid dan usang itulah yang melahirkan kemunduran dan kestasisan umat, karenanya umat Islam berhak mencampakkannya.

#### b. Thaha Husain

##### 1. Biografi Singkat

Thaha Husain lahir pada tanggal 14 November 1889 di desa Azbah Mesir. Keluarganya miskin, tetapi tidak termasuk yang sangat miskin. Ia anak ke tujuh dari tiga belas bersaudara atau tepatnya anak kelima dari sebelas orang bersaudara seayah-seibu. Ibunya adalah isteri kedua dari ayahnya. Thaha Husain mengalami kebutaan total pada usia enam tahun karena penyakit optahlmia yang mengenai matanya dan tidak terobati. Namun kebutaan mata tidak menjadi penghalang bagi Thaha Husain untuk belajar dan maju, bahkan keadaan itu mungkin justru yang memberi kualitas istimewa pada imajinasinya serta ciri khas pada tulisannya yang banyak menggunakan repetisi, kalimatnya panjang-panjang tersusun dari beberapa anak kalimat yang dirangkaikan dengan kata penghubung yang sederhana. Dalam dua jilid autobiografinya ia menggambarkan ketajaman perasaan dan pikiran seorang anak lelaki buta.

Jenjang pendidikannya diawali di sebuah Kutab, lembaga pendidikan dasar tradisional. Berkat kecerdasannya dan dorongan

Husain pada usia sebelas tahun telah berhasil

orang tuanya, Thaha



menghafal al-Qur'an dengan baik dan sempurna. Ia juga mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di al-Azhar Kairo. Di sinilah Thaha Husain mulai mengenal ide-ide pembaharuan Muhammad Abduh dan murid-muridnya. Ia sempat belajar di al-Azhar sepuluh tahun, tetapi pada sisi lain ia tidak senang dengan silabusnya yang tradisional dan membosankan sehingga ia kurang aktif mengikuti perkuliahan dan tidak berminat untuk menyelesaikan studinya. Pada tahun 1912 Thaha Husain mengikuti ujian akhir dan dinyatakan tidak lulus oleh team penguji. Akhirnya, tanpa mengulangi ujian di al-Azhar, pada tahun 1912 itu juga, ia pindah kuliah di Universitas baru Mesir, Universitas Cairo. Di sisni perkuliahan diberikan oleh sarjana-sarjana Barat, antara lain tokoh-tokoh orientalis Eropa yang termasyhur seperti Littman, Nallino dan Santillana. Dari mereka inilah ia memperoleh pengetahuan tentang metode modern dalam studi sejarah dan kritik sastra yang membuka perspektif baru bagi kebudayaan yang diwarisinya. Pada tahun 1914 Thaha Husain berhasil menyelesaikan pendidikannya di Universitas Cairo dan setahun kemudian. Pada tahun 1915, ia dikirim ke Prancis untuk belajar di Universitas Sorbone Paris.

Selama empat tahun di Prancis ia memperdalam pengetahuan tentang sastra Prancis, Falsafah dan sastra klasik. Ia membaca Anatole France dan mengikuti perkuliahan Durkheim serta menulis disertasi tentang Ibn Khaldun untuk mencapai gelar Doktor dengan judul *La*

*Philosopie Sociale D'Ibn Khaldun*. Kesuksesannya semakin lengkap ketika ia menikahi sekretarisnya sebagai isteri lebih dari sekedar matanya.

Sekembalinya dari Prancis, tahun 1919, karir Thaha Husain terus menanjak. Ia sebagai Dosen dan Administrator di Universitas Cairo dan Alexandria, sebagai pegawai di Kementrian Pendidikn dan dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1952 sebagai Menteri Pendidikan Mesir. Thaha Husain berada pada pusat kehidupan sastra dan akademis di Mesir dan selama itu pula ia memunculkan ide-ide pembaharuannya dengan konsisten.

## 2. Pemikiran Politik Islam

Ide-ide Thaha Husain berkisar pada masalah pendidikan, meskipun secara khusus ia sangat memperhatikan sastra, bahasa dan sejarah yang kesemuanya merupakan fenomena kebudayaan. Melalui pendidikan yang berorientasi pada kebudayaan Thaha Husain ingin memajukan bangsa Mesir.

Namun perjalanan karirnya hampir selalu diwarnai kontrol krisis besar. Yang pertama dihadapinya pada tahun 1926, tatkala sebuah budaya fi al-jahili, meledakkan protes hebat. Ada dua penyebab pokok pertama, ia menunjukkan sebagian kasar dari apa yang disebut sastra Arab Jahiliyah seperti dikenal saat itu sebenarnya bukan bersal dari syair Jahiliyah. Tata bahasa Arab para ahli ilmu Kalam serta para ahli hadis dan tafsir dengan demikian Thaha, secara

langsung atau tidak, seperti meragukan kredibilitas para ulama zaman lampau dalam mengambil kesimpulan di berbagai bidang kajian.

Thaha Husain menganut faham nasionalisme Mesir. Ia berpendapat bahwa di dunia modern, pusat loyalitas dan kesatuan sosial adalah Negara, dan baginya Negara itu berarti Mesir. Kesatuan wilayah baginya merupakan pokok dari solidaritas sosial dan perasaan kenegaraannya tertuju pada tanah air dan bukan pada kebangsaan ia pun tidak membedakan antara warga negara Muslim Mesir dan non Muslim. Sentiment nasional baginya paling penting. Dalam analisis terakhir yakin bahwa individu dan hak-haknya adalah lebih tinggi dari pada negara, tetapi di antara masyarakat-masyarakat negara adalah yang paling tinggi.

Dalam kesatuan nasional itu ia melihat agama penting dilihat dari nilai sosialnya yang merupakan isi dari ide nasional serta memperkokoh kesatuan Negara. Islam adalah salah satu faktor di dalam nasionalisme Mesir, karena itu di sekolah-sekolah Mesir harus diajarkan agama nasional sebagaimana sejarah nasional diajarkan. Betapa pun pentingnya agama, tetapi ia tidak dapat dijadikan pemandu dalam kehidupan politik atau sebagai batu ujian dari politik nasional, ide Negara harus didefinisikan di luar istilah-istilah religius.

Tentang bahasa Arab Thaha Husain tidak menekankan pada kepentingannya sebagai sarana kebangkitan agama, tetapi sebagai basis dari kehidupan nasional. Ia menganggap kepentingan bahasa

Arab bagi copti dan Muslim sama saja bahasa Arab bukan bahasa Muslim, tetapi ia bahasa semua yang berbicara bahasa Arab betapa pun berbeda keyakinan mereka, karena pentingnya bahasa Arab dan agama Islam di dalam membentuk nasionalisme Mesir keduanya wajib diajarkan di semua sekolah Mesir.

### 3. Islam Sebagai Sumber Tata Nilai dan Etika Negara

Pendapat ketiga ini adalah golongan yang berpendapat bahwa, Islam merupakan suatu agama yang serba lengkap yang didalamnya juga mengatur suatu sistem kenegaraan yang lengkap pula. Namun aliran ini tidak sependapat pula bila Islam sama sekali tidak ada hubungan dengan masalah politik dan ketatanegaraan. Menurut mereka Islam merupakan ajaran totalitas tetapi dalam bentuk petunjuk-petunjuk pokok saja. Karena itu menurut mereka, kendatipun dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan dalam artian teori lengkap, namun disana terdapat sejumlah tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara. Pemikir yang menganut paham ini adalah:

#### a. Mohammad Husain Haikal.<sup>114</sup>

##### 1. Biografi Singkat

Ia lahir pada tanggal 30 Agustus 1888 di sebuah desa yang bernama Kafr Ghanam, wilayah distrik Sembilawan. Propinsi Daqahlia yang terletak di daerah Delta Nil, kurang lebih 140 km dari

---

<sup>114</sup> M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, Cet. I (Yogyakarta: UUI Press, 2000), hlm. 2. Lihat juga, Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, .....hlm. 1-2.

Kairo, ibu kota Mesir. Ketika itu pemerintahan Mesir sedah diperintah oleh Khadewi Tawfiq (1879-1892), salah satu keturunan Muhammad Ali (1805-1848) dari Turki. Haikal berasal dari keluarga bangsawan yang terpandang dan sangat berpengaruh di desanya. Ia adalah anak pertama dari Husain Efendi Salim, seorang petani yang berpikiran maju. Pada tahun 1946 Haikal mencoba memberi gambaran tentang betapa bahagianya kehidupan di masa kecilnya dalam satu karangan pendek berjudul "Hidup itu (penuh) Cinta dan Kasih".<sup>115</sup> Dalam karangannya itu Haikal menceritakan tentang kakeknya Salim Haikal adalah seorang kepala negara (Syeikh al-Balad) karena dia yang paling tua di antara saudara-saudaranya, maka dialah yang kemudian mendapat tugas mengelola semua hak milik dan kekayaan keluarga besar tersebut. Mereka tinggal di sebuah rumah yang besar, yang dilengkapi dengan penggilingan gandum. Rumah tersebut tidak hanya dijadikan seagai rumah tinggal, tetapi juga dijadikan tempat istirahat para pekerja dan tempat berkumpulnya keluarga.<sup>116</sup>

Haikal memulai pendidikannya di sebuah *Kuttab* (semacam pendidikan dasar untuk mengkaji dan menghafal al-Qur'an bagi anak-anak) yang dipimpin oleh Syeikh Ibrahim Jad. Di tempat tersebut Haikal berhasil menghafal hampir sepertiga dari isi al-Qur'an. Sejak kecil dia sudah menunjukkan penghargaannya yang besar terhadap

---

<sup>115</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, .....hlm. 179.

<sup>116</sup> Musdah Mulia, *Negara Islam, Pemikir Politik Husain Haikal (Jakarta"* Paramadiana, 2001), hlm. 16

waktu. Di Kairo Haikal masuk sekolah dasar milik pemerintah yang terletak di distrik Jamaliyyah dan selesai pada tahun 1901 di usianya yang ke-13. Sedangkan untuk pendidikan menengah, Haikal pindah ke sekolah al-Khedewiyyah dan lulus pada tahun 1905. Ia bermaksud melanjutkan studinya ke Fakultas Teknik di Inggris, ada riwayat yang mengatakan ia ingin melanjutkan ke Fakultas Kedokteran. Tetapi menjelang berangkat, Salim Haikal meninggal dunia dan di antara yang datang melayat adalah Ahmad Luthfi Al-Sayyid (1871-1963) dan atas sarannya pula, akhirnya Haikal melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Hukum Kairo pada tahun 1905. Di masa inilah Haikal mulai banyak mempelajari buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh pembaharu dalam Islam. Dari situlah Haikal mulai menyadari akan arti pentingnya kebebasan berpikir dan perlunya ijtihad.

Pada tahun 1907, ketika Haikal duduk di tingkat II Sekolah Tinggi Hukum, Luthfi al-Sayyid mendirikan Partai Umat dan sekaligus menerbitkan Harian al-Jaridah yang menjadi terompet partainya. Kebetulan lokasi kampus Haikal berdekatan dengan kantor harian al-Jaridah sehingga ia sering menyempatkan diri mampir untuk mengikuti diskusi-diskusi yang diadakan oleh kelompok al-Jaridah. Pergulatannya dengan Luthfi dan kelompok al-Jaridah selama tahun 1907-1909 membuat keterkaitan Haikal pada dunia politik semakin kuat.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Musdah Mulia, *Negara Islam*, .....hlm. 19.

Haikal meraih gelar *Licence* dalam bidang hukum pada tahun 1909, selanjutnya dia dikirim ke Paris untuk mengikuti pendidikan pasca sarjana di Sorbone. Selama belajar di Paris, Haikal aktif di al-Jami'ah al-Mishriyyah (Organisasi Pemuda Mesir) dan al-Jami'ah al-Islamiyyah (Organisasi Pemuda Islam). Dia aktif mengikuti diskusi-diskusi dan pertemuan-pertemuan ilmiah pada dua organisasi tersebut. Antara tahun 1910-1911, Haikal menyelesaikan novelnya yang pertama berjudul *Zaynab* dan karyanya tersebut dipandang sebagai novel karya Mesir modern pertama.

## 2. Kondisi Sosial Politik

Suasana di Mesir semakin kacau dengan meletusnya Perang Dunia I (1914-1918) yang melibatkan Inggris dan Turki. Para pemuda dan mahasiswa menuntut agar dominasi Inggris di Mesir segera diakhiri. Tuntutan tersebut membawa kepada terjadinya "Revolusi Mesir" (al- Tsawrah al-Mishriyyah) yang dipimpin oleh Sa'd Zaglul (1859-1927). Tujuan inti dari revolusi ini adalah menuntut kemerdekaan Mesir yang terkenal dengan slogan "Mesir untuk bangsa Mesir".<sup>118</sup>

Dalam suasana seperti itu, sebagai pemuda Mesir, Haikal merasa berkewajiban ikut berjuang bagi kemerdekaan negerinya. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, pada tahun 1922 Haikal menutup kantornya di al-Mashurah dan meninggalkan profesi yang

---

<sup>118</sup> Musdah Mulia, *Negara Islam*, .....hlm. 23.

teah ia geluti selama sepuluh tahun sebagai pengacara. Selanjutnya ia bergabung dengan aktifis muda Mesir di Kairo dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan negerinya. Haikal dan kawan-kawannya kemudian mendirikan partai, meskipun pada saat itu sudah ada tiga partai, yaitu Partai Umat, Partai Nasional, dan Partai Khedewi. Akhirnya pada tahun 1918 dibentuklah suatu partai dengan nama Partai Demokrasi (*al-Hizb al-Dimuqrathi*) dengan tujuan pokok memperjuangkan kemerdekaan Mesir. Nama-nama pendirinya tercatat sebagai berikut; Mustafa 'Abd al-Raziq, Mansur Fahmi, Mahmud 'Azmi, Husain Haikal dan 'Aziz Mirham.

Seusai Perang Dunia I rakyat Mesir semakin gencar menuntut kemerdekaan. Pada masa ini lahir beberapa partai politik, di antaranya adalah Partai *al-Abrar al-Dusturiyin* (Partai Liberal Konstitusional) yang berdiri pada tahun 1922. Karena tertarik dengan program ini, Haikal kemudian bergabung dengan Partai tersebut. Lagi pula ketika itu Partai Demokrasi telah bubar. Di partai inilah Haikal mulai meniti karirnya sebagai politisi. Karena pengalamannya di bidang jurnalistik, Haikal selanjutnya dipilih sebagai pemimpin redaksi surat kabar *al-Siyasah*, organ resmi Partai Liberal, yang didirikan bersamaan dengan pendirian partai tersebut.

Pada saat itu perjuangan Mesir mulai menampakkan titik-titik cerah. Pada 28 Februari 1922 Inggris akhirnya menyatakan kemerdekaan Mesir. Dengan demikian Mesir resmi dengan demikian

Mesir resmi menjadi sebuah kerajaan yang berdaulat dengan Fu'ad I (1917-1936) sebagai raja pertama. Pemerintahan baru tersebut dinyatakan berbentuk monarki konstitusional. Pemerintahan kemudian membentuk Panitia Penyusun Undang-undang dan Haikal ditunjuk sebagai salah satu anggotanya.

Meskipun Inggris telah memberikan kemerdekaan kepada Mesir, namun intervensinya dalam urusan politik Mesir masih cukup kuat. Hal ini menimbulkan reaksi yang keras dari rakyat. Selain itu, pemerinthan Fu'ad I juga tidak islami.

### 3. Pemikiran Politik Islam

Dalam bukunya *al-Hukumat al-Islamiyat* yang khusus menguraikan masalah negara Islam, Haikal menempatkan prinsip persaudaraan sebagai prinsip dasar pertama dalam pengelolaan negara Islam. Dalam uraiannya mengenai prinsip persaudaraan ini, Haikal terlebih dahulu menjelaskan bahwa ajaran-ajaran yang diwahyukan Allah SWT kepada umat manusia melalui rasul-Nya mencakup berbagai aspek. Aspek penting dari ajaran-ajaran itu adalah *tauhid* atau paham ke Maha Esaan Tuhan selain Allah dan hanya Allah lah pencipta alam semesta. Seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk berasal dari sumber yang satu, yaitu Allah. Paham seperti ini membawa kepada keyakinan bahwa manusia seluruhnya bersaudara, meskipun berlainan warna, bangsa, dan bahasa, atau bahkan agama.

Prinsip persaudaran yang dijelaskan Haikal mengacu kepada ajaran tauhid.

Selanjutnya prinsip yang *kedua*, adalah prinsip persamaan antar manusia. Bagi Haikal prinsip persamaan antar manusia selain merupakan salah satu dari apa prinsip dasar Islam bagi pengelolaan hidup bermasyarakat juga merupakan salah satu dari prinsip dasar negara Islam. Namun prinsip yang dikemukakan Haikal berbeda dengan konsep Barat. Haikal menegaskan bahwa prinsip persamaan yang diajarkan Islam bersumber dari *tauhid*, yakni keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. Dialah yang menciptakan semua manusia dan di hadapan-Nya semua manusia itu sama, yang membedakan manusia hanyalah takwanya kepada Tuhan.

Ajaran persamaan ini, menurut Haikal mengandung nilai-nilai luhur dan hendaknya semua sistem sosial mengacu kepada nilai-nilai luhur tersebut. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Marcel A. Boisard yang menyatakan, prinsip persamaan merupakan *sokoguru* struktur sosial Islam.<sup>119</sup>

Prinsip dasar negara Islam yang *ketiga* menurut Haikal adalah, prinsip kebebasan. Ajaran kebebasan ini juga merupakan efek dari *tauhid*. Bagi Haikal kebebasan adalah suatu yang esensial dalam kehidupan manusia. Perbedaan hakiki antara manusia dan makhluk lain terletak pada unsur kebebasan. Dengan kebebasan, manusia dapat

---

<sup>119</sup> Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 125-126.

mencapai kebenaran, kemajuan, dan kesatuan. Bahkan dalam Islam kebebasan merupakan salah satu ajaran fundamental. Prinsip kebebasan dalam Islam, kata Haikal mencakup empat kebebasan: beragama, berpikir, menyatakan pendapat serta kebebasan dari rasa lapar dan takut.

#### **E. Pemikiran Politik Barat dan Peranannya Terhadap Dunia**

Sejarah manusia adalah sejarah peradaban itu sendiri. Tidak mungkin berbicara tentang (sejarah) perkembangan manusia yang membentang di seluruh peradaban, dari Sumeria Kuno dan Mesir hingga peradaban Klasik, dari Meso-Amerika hingga peradaban Kristen, dalam peradaban-peradaban Islam dan pengejawantahan-pengejawantahan suksesif peradaban Cina dan Hindu melalui *term-term* yang lain.<sup>120</sup>

Pandangan yang berkembang hingga dewasa ini bahwa lahirnya pemikiran di Barat berupa filsafat, ilmu pengetahuan, kebudayaan hingga berkembangnya peradaban Barat pada dasarnya berasal dari proses dan “pergumulan” dari interaksi peradaban besar yang telah ada sebelumnya. Peradaban itu terdiri dari Yunani-Romawi, Judeo-Kristenisasi, dan Islam.

Namun seiring pasang surut atau hukum “perguliran” sejarah, kemajuan satu peradaban bergulir kepada peradaban yang lain, bagai “roda” penggerak perubahan sekaligus penghancuran yang bermula dari puncak bagunan sejarah kelompok masyarakat kepada peredupan, penghancuran,

<sup>120</sup> Samuel P. Huntington, *Benturan Antarperadaban Dan Masa Depan Politik Dunia*, terj. M. Sadat Ismail. Cet. X (Yogyakarta: Qalam, 2006), hlm. 37.

bahkan hilangnya sebuah pelaku peradaban kecuali puing-puing kebudayaan. Tonybee berasumsi bahwa suatu peradaban bagaikan makhluk organis; lahir, berkembang, matang, dan pada akhirnya mengalami proses pembusukan. Kemudian dari proses pembusukan atau puing-puing itu memungkinkan akan terjadi kelahiran kembali peradaban yang baru, ini yang oleh Toynbee dinamakan teori tantangan jawaban (*challenge-response theory*).<sup>121</sup>

Bahwa dalam permasalahan yang harus sikapi dalam pemikiran politik Barat dalam interaksinya kepada dunia, dan menjadikan pemikiran-pemikiran Barat sebagai kiblat kebanyakan dari pemikiran-pemikiran manusia di dunia. Permasalahan tersebut setidaknya dapat dijadikan menjadi tiga hal:

*Pertama*, harus diakui bahwa dalam merekonstruksi sejarah perkembangan pemikiran politik Barat (modern) dewasa ini, dalam arti yang luas meliputi masalah pemikiran politik, asal-usul negara, kota, masyarakat, pemerintah dan kekuasaan, diplomasi, hubungan internasional, bentuk negara, konstitusi negara, dan lain-lainnya. Perspektif pemikiran politik modern sangat berat “berkiblat” pada cara pandang Barat. Akibatnya benang sejarah mengenai pemikiran politik Barat, berkesan menjadi *missing link* yakni ada keterputusan, penghilangan alur penyusunan sejarah secara lebih tepat.

Misalnya, dapat diamati ketika orang Barat (Eropa) timbul kesadaran untuk melakukan perubahan cara pandang yang “radikal” dari peradaban Gereja, penuh mistik dan mitologi (*the dark ages*) kepada peradaban yang memilih cara pandang rasional dan empirik, yang dikenal dengan abad

---

<sup>121</sup> Dr. Firdaus Syam, M.A., *Pemikiran Politik Barat Sejarah, Filsafat, .....* hlm. 1-2.

pencerahan Eropa (*Renaissance*). Padahal ketika itu, sejarah telah membuktikan, ketika Barat (Eropa) sedang mengalami kegelapan peradaban, di dunia Timur telah tegak peradaban yang sedang mengalami kejayaan yakni peradaban Islam, termasuk mengenai politik Islam. Sebuah peradaban yang memberikan pencerahan berbasis perpaduan dari spirit keimanan “Makah” dengan irasional “Yunani”.

*Kedua*, yang kita pahami sebagai pemikiran politik Barat, kini mengalami perluasan pengaruh ke dunia ke-3, saling bersentuhan dengan “kebudayaan lokal” dan dengan bagian-bagian dari peradaban sebelumnya (terutama Islam dan Kong Fuchu) ini melahirkan; *metamorfosis* dalam bentuk yang lain (modifikasi, revisi) bahkan sampai pada “penolakan” (*resistens*) yang kuat. Padahal jauh sebelumnya mereka itu, semua saling belajar.

*Ketiga*, bahwa akar dari dua peradaban “besar” yakni apa yang dikenal peradaban Islam Klasik dan peradaban Barat Renaisans, di abad modern ini telah bertemu, bersentuhan bahkan ada kecenderungan untuk terjadi “perbenturan peradaban” antara Islam dan Barat.<sup>122</sup>

Bentuk-bentuk perluasan atau penyebaran dari pemikiran Barat, baik melalui sistem fisik (perang) atau melalui pegukuhan penguasaan-penguasaan politik ke seluruh dunia, dalam arti, Barat di konstruksikan sebagai kiblat dari negara-negara yang ada di dunia.

Selama empat ratus tahun, sejarah menunjukkan hal yang sebaliknya. Hubungan antara Islam dan Kristen, baik Ortodoks maupun Barat, sering kali

---

<sup>122</sup> Dr. Firdaus Syam, M.A., *Pemikiran Politik Barat Sejarah, Filsafat*, hlm. 19-20.

penuh dengan ketegangan. Keduanya bersih kukuh pada “prinsip” masing-masing. Konflik abad XX antara demokrasi liberal dengan Marxis-Leninisme hanyalah sebuah fenomena historikal yang bersifat sementara dan superfisial jika di dibandingkan dengan hubungan konflikual antara Islam dengan Kristen. Suatu ketika keduanya hidup berdampingan secara damai, akan tetapi dilain waktu lebih sering terlibat dalam hubungan yang penuh persaingan, dan dalam pelbagai tingkatan, terlibat dalam kecamuk perang. “Dinamika historikal” mereka, menurut John Esposito, “sering kali sebagai dua komunitas yang sering bersaing, dan menatap pada pertempuran yang penuh kematian, demi kekuasaan, tanah, dan jiwa.” Selama berabad-abad, kedua agama tersebut melalui sebuah momentum yang penuh gelombang, masa-masa jeda dan saling menyerang dan mengalami jatuh bangun.<sup>123</sup>

Sejak abad VII hingga pertengahan abad VIII, kekuatan-kekutan Islam mampu mendirikan pemerintahan-pemrintahan Islam di Afrika Utara, Iberia, Timur Tengah, Persia, dan bagian utara India. Kemudian pada akhir abad XI, orang-orang Kristen ingin kembali menguasai wilayah barat Mediterranean, menyerang sicilia, dan menaklukkan Toledo.

Pada tahun 1095, orang Kristen mengorbarkan Perang Salib, dan selama satu Abad, setengah dari seluruh penguasa Kristen di dunia berusaha, dengan pelbagai kegagalan, mendirikan pemerintahan Kristen di “Tanah Suci” serta ingin menyatukan wilayah-wilayah dis sekitar Timur Dekat, melepaskan Arce, dimana mereka terakhir kali menginjakkan kaki di sana pad tahun 1291.

---

<sup>123</sup> Samuel P. Huntington, *Benturan Antarperadaban*, hlm. 375-376.

Sementara Turki Utsmani tampil di atas panggung, yang pertama kali mereka lakukan adalah melemahkan kekuatan Byzantium dan menaklukkan wilayah Balkan, serta Afrika Utara, mengepung Konstantinopel pada tahun 1453, dan pada tahun 1529 menyerbu Wina. Selama lebih dari 100 tahun, menurut Bernard Lewis, “sejak, pertama, pasukan Moor menjejakkan kaki di Spanyol hingga, kedua, orang-orang Turki menyerbu Wina, Eropa senantiasa merasakan adanya ancaman dari Islam.”

Selama abad XV, kondisi tersebut mulai berubah. Umat Kristen secara gradual merebut kembali Iberia dan menguasai Granada pada tahun 1492. Penemuan oleh orang Eropa dalam bidang navigasi memungkinkan bangsa Portugis dan bangsa Eropa lainnya menjelajahi wilayah-wilayah Islam, menembus lautan India dan menyebranginya.

Pada akhir Perang Dunia I, Inggris, Prancis, dan Italia merebut dan menguasai, baik secara langsung maupun tak langsung, seluruh wilayah kekuasaan Turki Utsmani, kecuali wilayah republik Turki. Pada tahun 1920, hanya terdapat empat negara Islam; Turki, Arab Saudi, Iran, dan Afghanistan yang tetap merdeka dari pelbagai bentuk pemerintahan non-Muslim.

Penarikan mundur kolonialisme Barat, pada gilirannya, mulai berjalan secara perlahan pada tahun 1920'an dan 1930'an serta mengalami akselerasi secara dramatis selama terjadinya bencana Perang Dunia II. Runtuhnya Uni Soviet mengantarkan kemerdekaan bagi masyarakat-masyarakat Muslim.<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup> Samuel P. Huntington, *Benturan Antarperadaban*, hlm. 376-377.

Terdapat berbagai faktor yang menjadi sebab terjadinya konflik antara Islam dengan Barat pada akhir abad XX, diantaranya dalam hal kekuasaan politik, *pertama*, upaya-upaya Barat yang simultan untuk mempropagandakan nilai-nilai dan institusi-institusi mereka, mempertahankan superioritas kekuatan militer dan ekonomi mereka, serta intervensi mereka terhadap berbagai konflik yang terjadi di dunia Islam menimbulkan “sakit hati” di kalangan umat Islam. Dan yang *kedua*, terjadinya hubungan dan percampuran antara orang-orang Islam dengan orang-orang Barat menstimulasi munculnya rasa identitas keduanya dan bagaimana membedakan antara satu dengan yang lain.<sup>125</sup>

Barat sebagai kiblat negara-negara di dunia saat ini, bahwa sebuah konsensus luar biasa berkenaan dengan legitimasi demokarsi liberal sebagai sistem pemerintahan telah muncul di seluruh dunia selama beberapa tahun terakhir, setelah ia menakhlikkan ideologi-ideologi pesaingnya seperti monarki turun-temurun, fasisme dan baru-baru ini komunisme. Lebih dari itu, saya (Francis Fukuyama) berpendapat bahwa demokarsi liberal mungkin merupakan “titik akhir dari evolusi idiologis umat manusia”, dan “bentuk final pemerintahan manusia”, sehingga ia bisa di sebut sebagai “akhir sejarah”.<sup>126</sup>

Perkembangan yang luar biasa dalam seperempat abad terakhir pada abad ke-20 telah membuka rahasia yang sangat besar mengenai kekurangan-kekuarangan dalam inti dunia seperti kelemahan para diktator, baik mereka merupakan kelompok militer-otoritarian Kanan, maupun totalitarian-komunis

---

<sup>125</sup> Samuel P. Huntington, *Benturan Antarperadaban*, hlm. 379-380.

<sup>126</sup> Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, terj. M.H. Amrullah. Cet. III (Yogyakarta: Qalam, 2004), hlm. 1.

kiri. Dari Amerika Latin sampai Eropa Timur, dari Uni Soviet sampai Timur Tengah dan Asia, pemerintah-pemerintah yang kuat telah gagal pada dua dasawarsa terakhir ini.

#### **F. Perbedaan Sistem Politik Islam dengan Sistem Politik Barat**

Pembicaraan tentang sistem politik Islam untuk mencari kemiripan dan kesamaan sistem politik Islam dengan sistem manapun baik yang ada pada masa lalu maupun sekarang, kemiripan dan persamaan ini terutama karena ia hanya merupakan riak kecil dipermukaan dan sekedar akulturasi bagian ranting, serta bukan dalam filsafat dan konsepsi dasar maka ia sama sekali tidak akan dapat mengeser kekuatan Islam seperti yang selama ini diduga oleh bagian kaum muslimin. Jalan yang tepat untuk mereka tempuh tidak lain adalah mengemukakan asas agama mereka untuk sendiri disertai dengan keimanan penuh bahwa sistem Islam merupakan satu asas yang lengkap dan sempurna, tidak peduli apakah ia mirip dengan sistem-sistem lain maupun berbeda dengannya. Ia pun (politik Islam) tidak perlu mencari dukungan dari kemiripan dan kesamaan dengan sistem lain bagi Islam, sebab hal itu seperti sebagaimana yang telah Sayyid Quthb katakan; “Hanyalah merupakan perasaan rendah diri yang tidak akan mungkin dikemukakan oleh seorang penulis Islam sepanjang ia memahami hakikat ajaran Islam dan melakukan pembahasan dengan sejujur-jujurnya”<sup>127</sup>.

---

<sup>127</sup> Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, hlm. 123.

Perbedaan politik Islam dengan politik yang lainnya, memberikan warna dan karakter tersendiri terhadap perkembangan pemikiran-pemikiran yang ada di dunia. Yang jelas penerapan sistem politik yang sesuai dengan kondisi material di tiap-tiap negara mempunyai perbedaan-perbedaan.

*Pertama*, sistem politik atau pemerintahan Islam bukan sistem kerajaan atau monarki. Karena Islam tidak mengakui sistem kerajaan. Sistem pemerintahan Islam juga tidak menyerupai sistem kerajaan. Hal itu karena dalam sistem kerajaan, seorang anak (putra mahkota) menjadi raja karena pewarisan, umat tidak ada hubungannya dengan pengangkatan raja. Adapun dalam sistem Khilafah (sistem Islam) tidak ada pewarisan. Akan tetapi, *baiat* dari umatlah yang menjadi metode untuk mengangkat khalifah (pemimpin pemerintahan).

Sistem kerajaan juga memberikan keistimewaan dan hak-hak khusus kepada raja yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari individu rakyat. Hal itu menjadikan raja berada di atas undang-undang dan menjadikannya simbol bagi rakyat, yakni ia menjabat sebagai raja tetapi tidak memerintah, seperti yang ada dalam beberapa sistem kerajaan, atau ia menduduki jabatan raja sekaligus memerintah untuk mengatur negeri dan penduduknya sesuai dengan keinginan dan kehendak hawa nafsunya, sebagaimana yang ada dalam beberapa sistem kerajaan yang lain. Raja tetap tidak tersentuh hukum meskipun ia berbuat buruk atau zalim. Sebaliknya, dalam sistem Khilafah atau Islam, Khalifah tidak diberi kekhususan dengan keistimewaan yang menjadikannya berada di atas rakyat sebagaimana seorang raja. Khalifah juga

tidak diberi kekhususan dengan hak-hak khusus yang mengistimewakannya di hadapan pengadilan dari individu-individu umat.

Khalifah juga bukanlah simbol umat dalam pengertian seperti raja dalam sistem kerajaan. Akan tetapi, Khalifah merupakan wakil umat dalam menjalankan pemerintahan dan kekuasaan. Ia dipilih dan dibaiat oleh umat untuk menerapkan hukum-hukum syariah atas mereka. Khalifah terikat dengan hukum-hukum syariah dalam seluruh tindakan, kebijakan, keputusan hukum, serta pengaturannya atas urusan-urusan dan kemaslahatan umat.<sup>128</sup>

*Kedua*, sistem politik atau pemerintahan Islam bukan sistem republik. Sistem republik pertama kali tumbuh sebagai reaksi praktis terhadap penindasan sistem kerajaan (monarki). Sebabnya, raja memiliki kedaulatan dan kekuasaan sehingga ia memerintah dan bertindak atas negeri dan penduduk sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Rajalah yang menetapkan undang-undang menurut keinginannya. Lalu datanglah sistem republik, kemudian kedaulatan dan kekuasaan dipindahkan kepada rakyat dalam apa yang disebut dengan demokrasi. Rakyatlah yang kemudian membuat undang-undang; yang menetapkan halal dan haram, terpuji dan tercela. Lalu pemerintahan berada di tangan presiden dan para menteri dalam sistem republik presidentil dan di tangan kabinet dalam sistem republik parlementer. (Contohnya menyangkut pemerintahan di tangan kabinet ada di dalam sistem monarki yang kekuasaan pemerintahannya dicabut dari tangan raja, ia hanya menjadi simbol: ia menjabat raja, tetapi tidak memerintah).

---

<sup>128</sup> <http://www.syabab.com/2010/11/22/>.

Adapun dalam Islam, kewenangan untuk melakukan legislasi (menetapkan hukum) tidak di tangan rakyat, tetapi ada pada Allah. Tidak seorang pun selain Allah dibenarkan menentukan halal dan haram. Dalam Islam, menjadikan kewenangan untuk membuat hukum berada di tangan manusia merupakan kejahatan besar.

Dalam sistem republik, pemerintahan didistribusikan di antara departemen yang disatukan dalam kabinet yang memegang kekuasaan secara kolektif. Dalam Islam tidak terdapat departemen yang memiliki kekuasaan pemerintahan secara keseluruhan (menurut bentuk demokrasi). Akan tetapi, Khalifah dibaiat oleh umat untuk memerintah mereka menurut Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Khalifah berhak menunjuk para mu'âwin (*wazîr tafwîdh*) untuk membantunya mengemban tanggung jawab kekhilafahan. Mereka adalah para wazîr dalam makna bahasa yaitu para pembantu (mu'âwin) Khalifah dalam masalah-masalah yang ditentukan oleh Khalifah.<sup>129</sup>

*Ketiga*, sistem politik atau pemerintahan Islam bukan sistem perlementer atau kedaulatan hukum. Hukumlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Hukum merupakan penjelmaan dari kemauan negara (wakil rakyat yang ada di perlemen red.), akan tetapi dalam keanggotaannya negara sendiri tunduk kepada hukum yang dibuatnya. Semua kegiatan lembaga pemerintahan dan prengkat politik lainnya haruslah berdasarkan dan dibatasi oleh hukum.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup> <http://www.syabab.com/2010/11/22/>.

<sup>130</sup> M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, hlm.106.

Dalam politik Islam, kedaulatan hukum maksudnya adalah yang memiliki bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri. Karena baik raja atau penguasa maupun rakyat atau warga negara, bahkan negara itu sendiri semua tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum.<sup>131</sup> Sumber hukum ini, tidak lain adalah hukum yang ditetapkan oleh Tuhan kepada manusia di dunia, berupa al-Qur'an dan al-Sunnah. Al-Qur'an dan as-Sunnah menjadi acuan tunggal dalam dasar hukum diberlakukan, dan semua sikap, tingkah laku, dan semua perbuatan negara maupun manusia harus sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karenanya al-Qur'an dan as-Sunnah membatasi semua perilaku negara maupun manusia dalam implementasi interaksinya.

*Keempat*, sistem politik atau pemerintahan Islam bukan sistem kedaulatan rakyat atau demokrasi. Politik ideologi barat merupakan kemampuan negara barat dalam mengatur ideologinya untuk disebarkan ke seluruh dunia baik dalam bentuk pemikiran (qaidah fikriyah) maupun dalam bentuk kepemimpinan politik (qiyadah fikriyah) yang berasaskan sekularisme. Dengan kemampuannya yang prima negara-negara barat yang maju secara sains dan teknologi mampu memukau generasi cendekiawan dari negeri-negeri muslim untuk belajar di negara barat ilmu filsafat barat dan sekaligus sebagai agen serta menjadikan kapitalisme acuan dalam menyelesaikan problematika kehidupan.

---

<sup>131</sup> M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, hlm. 108.

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dibuat manusia, dengan tujuan untuk membebaskan diri dari kezhaliman dan penindasan para penguasa terhadap manusia atas nama agama. Demokrasi adalah suatu sistem yang bersumber dari manusia. Tidak ada hubungannya dengan wahyu atau agama. Karena itu, sumber kemunculan sistem demokrasi seluruhnya adalah manusia, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan wahyu atau agama.

Demokrasi merupakan lafal dan istilah Barat yang digunakan untuk menunjukkan *pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat*. Rakyat dianggap penguasa mutlak dan pemilik kedaulatan, yang berhak mengatur urusannya sendiri, serta melaksanakan dan menjalankan kehendaknya sendiri. Rakyat tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan siapapun, selain kekuasaan rakyat. Rakyat berhak membuat peraturan dan undang-undang sendiri karena mereka adalah pemilik kedaulatan melalui para wakil rakyat yang mereka pilih. Rakyat berhak pula menerapkan peraturan dan undang-undang yang telah mereka buat, melalui para penguasa dan hakim yang mereka pilih dan keduanya mengambil alih kekuasaan dari rakyat, karena rakyat adalah sumber kekuasaan. Setiap individu rakyat sebagaimana individu lainnya berhak menyelenggarakan negara, mengangkat penguasa, serta membuat peraturan dan undang-undang.

Demokrasi menghendaki manusia tidak terikat dengan aturan Allah SWT. Hal ini berbeda dengan Islam yang menghendaki seluruh kaum muslimin dalam seluruh aktivitas hidup mereka senantiasa wajib terikat dengan perintah dan larangan Allah. Mereka tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam, sebagaimana

mereka tidak boleh membuat satu hukum pun, dikarenakan memang hanya Allah saja yang layak bertindak sebagai *Musyarri'*.<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup> [http://syariaislam.multiply.com/journal/item/11/Serangan\\_Barat\\_Atas\\_Dunia\\_Islam/2010/12/22/](http://syariaislam.multiply.com/journal/item/11/Serangan_Barat_Atas_Dunia_Islam/2010/12/22/). Lihat Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 60 dan 65, al-An'am: 57.